

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI, *BI RATE*, DAN
NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Tuty Amanah

NPM. 1551020320

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI, *BI RATE*, DAN
NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Oleh
Tuty Amanah
NPM. 1551020320
Jurusan : Perbankan Syariah**

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A

Pembimbing II : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Bank Syariah dalam melakukan pembiayaan tentu akan dihadapkan pada risiko pembiayaan berupa pembiayaan bermasalah. Perkembangan ekonomi yang tidak pasti dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah. Beberapa indikator ekonomi makro yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah antara lain adalah Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2008-2018?, Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2008-2018, serta untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia.f

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data *time series* periode 2008-2019 yang bersumber dari *website* resmi BPS, BI, OJK, dan Kementerian Perdagangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia (BUS, UUS, dan BPRS). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh 44 data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda atau *Ordinary Least Square* (OLS), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), serta uji hipotesis (uji t dan uji F). Data diolah menggunakan aplikasi EViews 9 dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%).

Hasil uji t menunjukkan bahwa PDB memiliki nilai $t_{hitung} -2,0728$ dan nilai signifikansi $0,0449 < 0,05$ artinya PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS, inflasi memiliki nilai $t_{hitung} 0,2438$ dan nilai signifikansi $0,8086$ artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS, *BI Rate* memiliki nilai $t_{hitung} -2,7208$ dan nilai signifikansi $0,0097 < 0,05$ artinya *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS, nilai tukar memiliki nilai $t_{hitung} 9,0276$ dan nilai signifikansi $0,0000 < 0,005$ artinya nilai tukar (IDR/USD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS. Berdasarkan uji F diperoleh nilai $F_{hitung} 54,7188$ dan nilai signifikansi $0,0000$ artinya PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS. Dalam ekonomi Islam, pembiayaan selain didasarkan atas asas kerjasama juga didasarkan atas asas tolong-menolong dan toleransi oleh pihak bank syariah terhadap nasabah yang tidak mampu membayar angsuran atau melunasi kewajibannya pada BPRS.

Kata Kunci: Produk Domestik Bruto, Inflasi, *BI Rate*, Nilai Tukar Rupiah, dan Pembiayaan Bermasalah



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI, BI RATE, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018)

Nama : Tuty Amanah

NPM : 1551020320

Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 26 Agustus 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A
NIP. 195304231980031003

Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek
NIP. -

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI, BI RATE, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018)”** disusun oleh:

Tuty Amanah, NPM : 1551020320, Jurusan : Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. M. Nasrudin, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Ahmad Hazaz Syarif, S.E.I., M.E.I

(.....)

Penguji I : Ahmad Zuliansyah, M.M

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾ (سورة الحشر : ٥٩ : ١٨)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 548.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Tuty Amanah, lahir di Pekon Balak, Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 6 Juli 1997. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dan merupakan putri dari Bapak Warsito dan Ibu Sri Wahyuni.

Riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

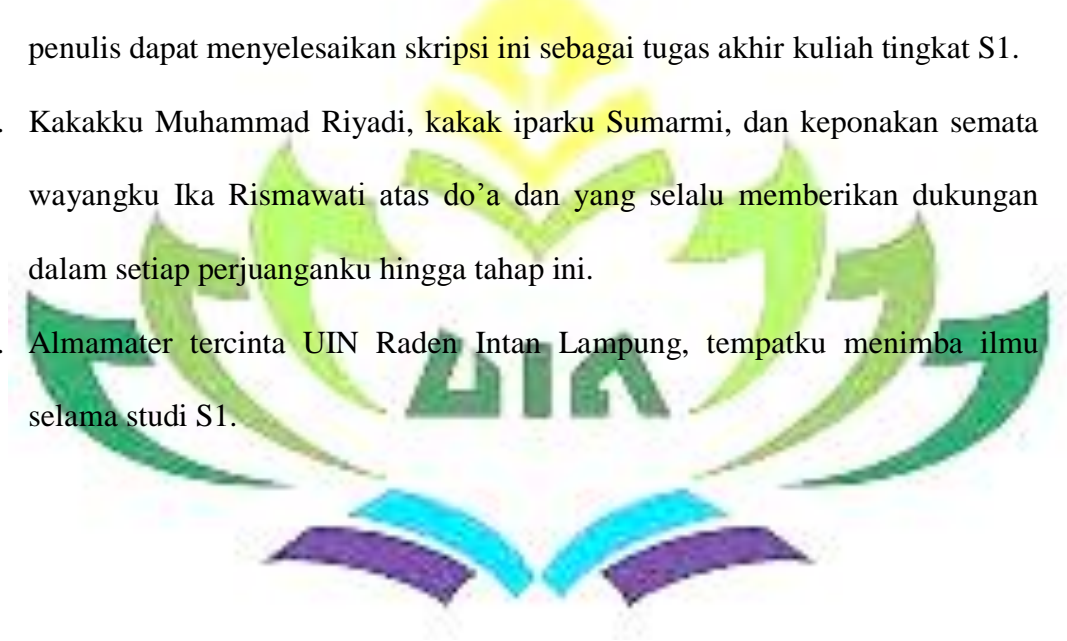
1. SD Negeri 1 Padang Cahya, lulus pada tahun 2009
2. MTs Negeri 1 Liwa, lulus pada tahun 2012
3. SMK Negeri 1 Liwa dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, lulus pada tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2015



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'ālamīn, dengan penuh rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan Allah SWT., skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanggungjawab, tanda cinta dan kasih sayang, serta rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Warsito dan Ibu Sri Wahyuni atas kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materil, serta yang tiada pernah lelah memberikan motivasi, do'a, dukungan, dan pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir kuliah tingkat S1.
2. Kakakku Muhammad Riyadi, kakak iparku Sumarmi, dan keponakan semata wayangku Ika Rismawati atas do'a dan yang selalu memberikan dukungan dalam setiap perjuanganku hingga tahap ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempatku menimba ilmu selama studi S1.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu skripsi ini. Shalawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Adapun judul skripsi ini adalah “PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI, *BI RATE*, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018). Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah berkat bimbingan, dukungan, do'a, dan saran-saran dari berbagai pihak. Tanpa kontribusi dari berbagai pihak tersebut, upaya penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu akan terasa lebih sulit terwujud. Oleh karena itu, penulis haturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.S.I, selaku Dekan.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

3. Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Isnaeni, S.Ag., M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah FEBI UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A, selaku Pembimbing I dan Ibu Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan, dan memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan, serta Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, khususnya Perbankan Syariah kelas C.
10. Bapak dan Ibu kos, kakak-kakak, teman-teman, serta adik-adik kosan Cendana Putri I. Terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangat yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan.
11. Pihak-pihak lain yang telah memberikan kontribusi atas penyelesaian skripsi ini baik moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Terimakasih yang sebesar-sebesarnya, semoga Allah SWT. mencatat sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi satu karya yang bermanfaat bagi kita, khususnya bagi penulis sendiri.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2019
Penulis,

Tuty Amanah
NPM. 1551020320



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang | 5 |
| D. Batasan Masalah | 18 |
| E. Rumusan Masalah | 19 |
| F. Tujuan Penelitian | 19 |
| G. Manfaat Penelitian | 20 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Perbankan Syariah | |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan Syariah | 20 |
| 2. Falsafah Operasional Bank Syariah | 23 |
| 3. Tujuan Bank Syariah..... | 25 |
| 4. Fungsi Utama Perbankan Syariah | 27 |
| 5. Produk-produk Bank Syariah..... | 29 |

| | |
|--|----|
| B. Pembiayaan pada Bank Syariah | |
| 1. Pengertian Pembiayaan | 35 |
| 2. Penetapan Kualitas Pembiayaan | 36 |
| 3. Pelaksanaan Pembiayaan dalam Bank Syariah..... | 38 |
| C. Pembiayaan Bermasalah | |
| 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah | 41 |
| 2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah | 43 |
| 3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah | 45 |
| D. Produk Domestik Bruto (PDB) | |
| 1. Pengertian Produk Domestik Bruto | 51 |
| 2. Metode Perhitungan Produk Domestik Bruto..... | 51 |
| 3. PDB dalam Ekonomi Islam | 53 |
| 4. Hubungan PDB dengan Pembiayaan Bermasalah | 54 |
| E. Inflasi | |
| 1. Pengertian dan Jenis-jenis Inflasi..... | 55 |
| 2. Dampak Inflasi..... | 57 |
| 3. Inflasi dalam Ekonomi Islam | 58 |
| 4. Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan Bermasalah..... | 60 |
| F. <i>BI Rate</i> | |
| 1. Pengertian <i>BI Rate</i> | 61 |
| 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga | 62 |
| 3. <i>BI Rate</i> dalam Ekonomi Islam | 64 |
| 4. Hubungan <i>BI Rate</i> dengan Pembiayaan Bermasalah..... | 64 |
| G. Nilai Tukar Rupiah | |
| 1. Pengertian Nilai Tukar (Kurs)..... | 65 |
| 2. Faktor yang Mempengaruhi Kurs | 65 |
| 3. Nilai Tukar dalam Ekonomi Islam..... | 68 |
| 4. Hubungan Nilai Tukar dengan Pembiayaan Bermasalah | 68 |
| H. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 68 |
| I. Kerangka Pemikiran..... | 74 |
| J. Hipotesis | 75 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 80 |
| B. Jenis dan Sumber Data..... | 80 |
| C. Populasi dan Sampel | 81 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 82 |
| E. Definisi Operasional Variabel..... | 83 |
| F. Metode Analisis Data | |
| 1. Analisis Statistik Deskriptif | 85 |
| 2. Uji Asumsi Klasik..... | 86 |
| 3. Analisis Regresi Berganda..... | 89 |
| 4. Uji Hipotesis | 90 |

BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

| | |
|--|-----|
| A. Penyajian Hasil Penelitian | |
| 1. Gambaran Singkat Objek Penelitian..... | 92 |
| 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif..... | 96 |
| 3. Hasil Uji Asumsi Klasik | 98 |
| a. Uji Normalitas..... | 99 |
| b. Uji Multikolinearitas..... | 99 |
| c. Uji Autokorelasi..... | 100 |
| d. Uji Heteroskedastisitas..... | 102 |
| 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda..... | 102 |
| 5. Hasil Uji Hipotesis..... | 104 |
| a. Uji Simultan (Uji t)..... | 104 |
| b. Uji Parsial (Uji F)..... | 106 |
| c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 106 |
| B. Analisis Data | |
| 1. Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, <i>BI Rate</i> , dan Nilai Tukar Rupiah Secara Parsial Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018 | |

| | |
|--|-----|
| a. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018 | 107 |
| b. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018 | 109 |
| c. Pengaruh <i>BI Rate</i> Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018 | 112 |
| d. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018 | 114 |
| 2. Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, <i>BI Rate</i> , dan Nilai Tukar Rupiah Secara Simultan Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018 | 116 |
| 3. Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam | 118 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 125 |
| B. Saran | 126 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 1.1 | Perkembangan Produk Domestik Bruto, Inflasi, <i>BI Rate</i> , dan Nilai Tukar Rupiah Periode 2008-2018 | 17 |
| Tabel 2.1 | Definisi Operasional Variabel | 84 |
| Tabel 4.1 | Hasil Analisis Statistik Deskriptif | 96 |
| Tabel 4.2 | Hasil Uji Normalitas..... | 99 |
| Tabel 4.3 | Hasil Uji Multikolinearitas | 100 |
| Tabel 4.4 | Hasil Uji Autokorelasi | 101 |
| Tabel 4.5 | Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Diferensiasi..... | 101 |
| Tabel 4.6 | Hasil Uji Heteroskedastisitas..... | 102 |
| Tabel 4.7 | Hasil Uji Regresi Linear Berganda..... | 103 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Grafik Jumlah Pembiayaan BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia Periode 2014-2018 | 11 |
| Gambar 1.2 | Grafik Nilai NPF BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia Periode 2014-2018 | 13 |
| Gambar 2.1 | Kerangka Pemikiran..... | 74 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Produk Domestik Bruto Periode 2008-2018
- Lampiran 2 Tabel Inflasi Periode 2008-2018
- Lampiran 3 Tabel *BI Rate* Periode 2008-2018
- Lampiran 4 Tabel Nilai Tukar (IDR-USD) Periode 2008-2018
- Lampiran 5 Tabel Nilai NPF BPRS Periode 2008-2018
- Lampiran 6 Tebel Data Penelitian (PDB, Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar (IDR-USD) per Triwulan Periode 2008-2018
- Lampiran 7 Hasil Output Eviews 9 (Uji Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik dan Uji Regresi Linear Berganda)
- Lampiran 8 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 9 Berita Acara Munaqasah
- Lampiran 10 SK Pembimbing
- Lampiran 11 Blangko Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini dan menghindari kekeliruan bagi pembaca, maka perlu adanya uraian dan pembatasan arti serta maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Hal ini diperlukan agar dapat memperoleh gambaran yang jelas terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI, BI RATE, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018)”**.

Berikut merupakan uraian istilah-istilah yang terkait dengan judul penelitian.

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²
2. Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu.³ PDB mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah negara tanpa membedakan kepemilikan/kewarganegaraan pada suatu periode tertentu.

² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 849.

³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 34.

3. Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Terdapat tiga syarat untuk dapat dikatakan terjadi inflasi, yaitu adanya kenaikan harga, kenaikan terjadi terhadap harga barang secara umum, dan kenaikan harga tersebut berlangsung cukup lama.⁴
4. *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.⁵
5. Nilai Tukar, lebih umumnya *Exchange Rates* (nilai tukar uang) atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*) atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing.⁶
6. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.⁷

⁴ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), h. 186.

⁵ Kristiani Naibaho, Sri Mangesti Rahayu, "Pengaruh GDP, Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar Terhadap Non Performing Loan Bank Umum Konvensional di Indonesia (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)". (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 62 No. 2, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sriwijaya, 2018), h. 91.

⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 157.

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 123.

7. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.⁸
8. Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep ekonomi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.⁹ Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.¹⁰

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan. Setiap kegiatan usaha pasti mengandung risiko, termasuk dalam memberikan pembiayaan tentu bank syariah akan menghadapi risiko yaitu risiko pembiayaan berupa pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Bank Indonesia menetapkan batas aman untuk tingkat NPF bagi bank yaitu sebesar 5%. Jika nilai NPF bank lebih dari 5%, maka bank tersebut dinyatakan mengalami kegagalan dalam menekan tingkat NPF di bawah angka 5% (ambang batas aman tingkat NPF).

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1062.

⁹ Ifham Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h.259.

¹⁰ Rivai Vaithzal, Buchari Andi, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2009), h.

Sebagai salah satu aktivitas utama, pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank syariah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi, tentu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan bank syariah. Perkembangan NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam beberapa tahun terakhir bergerak secara fluktuatif. Bahkan dari tahun ke tahun NPF BPRS mencapai angka lebih dari 5%. Perkembangan ekonomi yang tidak pasti merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah. Makroekonomi sebagai salah satu indikator tolak ukur perkembangan ekonomi terdiri dari beberapa indikator. Beberapa indikator makroekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah, antara lain adalah Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah.

2. Secara Subjektif

- a. Pokok bahasan penelitian ini sesuai dengan program studi penulis yakni Perbankan Syariah, dimana bahasan tersebut merupakan kajian keilmuan yang mempunyai kaitan dengan beberapa mata kuliah yang pernah peneliti ampu selama perkuliahan.
- b. Tersedianya sumber data dan literatur yang memadai yaitu berupa buku, jurnal ilmiah, laporan-laporan yang diperoleh dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

C. Latar Belakang

Perbankan memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.¹¹ Oleh karena itu, kata bank merupakan kata yang tidak asing lagi bagi masyarakat yang hidup diperkotaan maupun di pedesaan.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana serta memberikan jasa bank dalam bentuk lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹²

Ditinjau dari segi cara penentuan harganya bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional

12. ¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), h.

¹² *Ibid.*, h. 12-13.

merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa, baik balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Di samping itu, untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabahnya.¹³

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.¹⁴ Adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1, pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”¹⁵

Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha

¹³ Ismail, *Manajemen Perbankan ...*, h. 19-20.

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 1.

¹⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 16.

berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan UUS (Unit Usaha Syariah) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.¹⁶

Bank konvensional dan bank syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa bank. Bank menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak digunakan dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit margin*).

Perbankan konvensional menyalurkan dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang. Uang yang dikucurkan oleh bank tersebut kemudian dapat dipakai oleh nasabah debitur untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Sedangkan dalam perbankan syariah, bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*),

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1

baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.¹⁷

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam sangat melarang umatnya memakan harta yang diperoleh dari riba. Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba ba'i*). Riba *ba'i* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*) dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiyah*). Riba *dayn* berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok.¹⁸

Allah SWT. telah berfirman dalam surat Al-Imran (3) ayat 130 tentang larang riba dalam Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزَّةً ۖ وَتَتَّقُوا اللَّهَ ۖ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ (سورة العنمرن : ٣ : ١٣٠)

¹⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 101.

¹⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 13.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*¹⁹

Secara garis besar, produk penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam* dan *istishna*; berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik (ijarah wa iqtina)*; berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah* dan *musaqah*; dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh* dan *qardh al hasan*.²⁰

Portofolio pembiayaan (*financing*) merupakan bagian terbesar dari aset bank. Dengan demikian, pendapatan bank yang diperoleh dari kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan baik pembiayaan berdasarkan akad jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil maupun berdasarkan akad pinjaman yang bersifat sosial merupakan sumber pendapatan yang dominan bagi perbankan syariah.²¹

Tidak ada istilah bebas risiko dalam ekonomi Islam. Risiko bisa terjadi setiap detik dalam usaha dan bisa terjadi dimana pun. Begitu juga dengan setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah pasti memiliki risiko. Dalam melakukan aktifitas pembiayaan, bank syariah

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 66.

²⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* ..., h. 102.

²¹ Daisy Firmansari, Noven Suprayogi, "Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Spesifik Bank Terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Period 2003-2014". (JESTT Vol.2 No.6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2015), h. 513.

akan menghadapi risiko yaitu risiko pembiayaan berupa pembiayaan bermasalah.²² Allah SWT. berfirman dalam surat Luqman (31) ayat 34 berikut ini.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ (سورة لقمان : ٣١ : ٣٤)

Artinya : *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*²³

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat tidak semuanya berkategori sehat. Diantara seluruh pembiayaan yang disalurkan tersebut terdapat pembiayaan yang mempunyai kualitas buruk atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah dalam dunia perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).²⁴

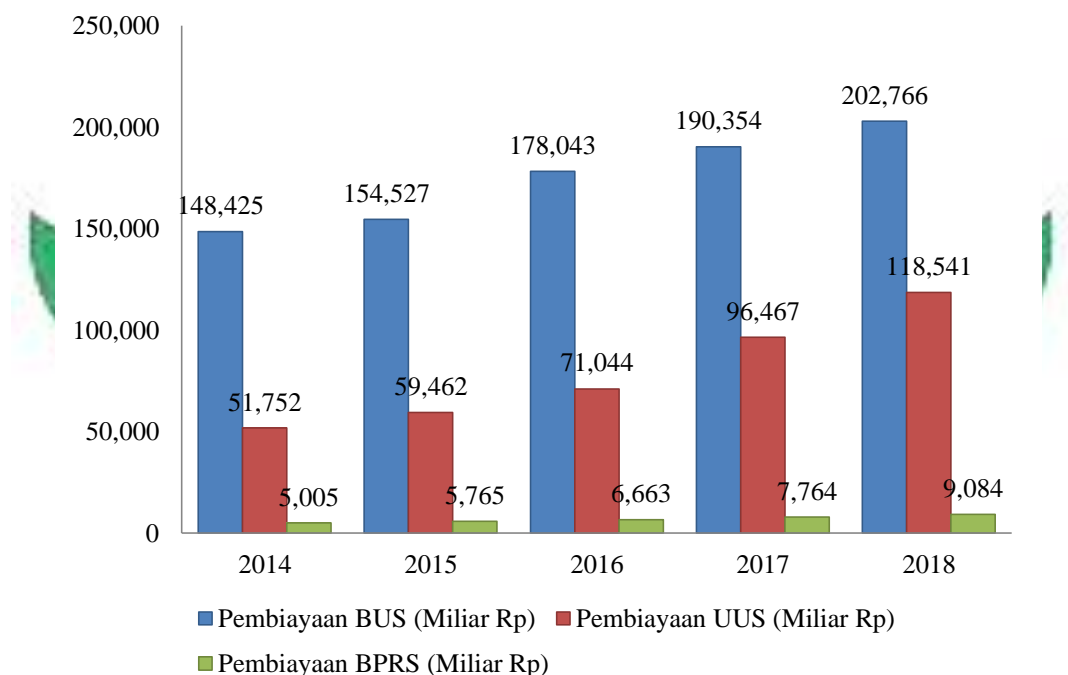
Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak

²² Daisy Firmansari dan Noven Suprayogi, *Pengaruh Variabel ...*, h. 513.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, h. 414.

²⁴ Satrio Wijoyo, "Analisis Faktor Makroekonomi dan Kondisi Spesifik Bank Syariah terhadap Non Performing Finance (Studi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Ada di Indonesia Periode 2010:1-2015:12)". (Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 6, 2016, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta), h. 514.

menepati jadwal angsuran. Hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (bank dan nasabah). NPF yang tinggi akan menyebabkan rasio likuiditas dana pihak ketiga semakin rendah dan memunculkan kekhawatiran dana yang disimpannya tidak akan kembali.²⁵ Bank Indonesia menetapkan ukuran maksimal tingkat rasio pembiayaan bermasalah sebesar 5%. Dengan demikian suatu bank dapat dikatakan mengalami kegagalan dalam menekan tingkat npf dalam posisi aman apabila mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah hingga melebihi angka 5%.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2014-2018²⁶

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Pembiayaan BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia
Periode 2014-2018

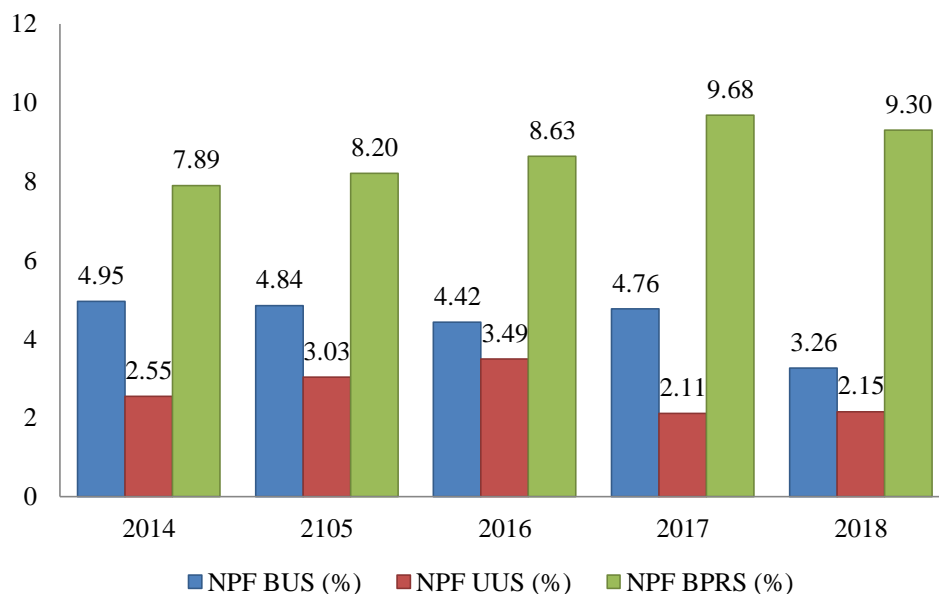
²⁵ Amir Hamzah, "Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017)". (Journal of Islamic Finance and Accounting, Vol. 1 No.2, Universitas Kuningan, 2018), h. 74.

²⁶"Statistik Perbankan Syariah 2014-2018" (On-line), tersedia di <http://www.ojk.co.id> (28 Februari 2019)

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kepada masyarakat pada tahun 2014 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun sama-sama selalu mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah pembiayaan BUS, UUS, dan BPRS memiliki perbedaan jumlah yang cukup banyak. Jumlah pembiayaan yang disalurkan BUS merupakan yang paling banyak, sedangkan yang paling sedikit adalah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS.

Jumlah pembiayaan yang disalurkan BUS pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 148.425 Miliar, tahun 2015 sebesar Rp 154.527 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp 178.043 Miliar, tahun 2017 sebesar Rp 190.354 Miliar, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 202.766 Miliar. Dengan demikian, jumlah pembiayaan yang disalurkan BUS dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 54.341 Miliar. Adapun jumlah pembiayaan UUS pada tahun 2014 sebesar Rp 51.725 Miliar, tahun 2015 sebesar Rp 59.462 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp 71.044 Miliar, tahun 2017 sebesar Rp 96.467 Miliar, dan tahun 2018 sebesar Rp 118.541 Miliar. Dengan demikian, dari tahun 2014 hingga tahun 2018 jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh UUS meningkat sebesar Rp 44.715 Miliar. Sedangkan jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 5.005 Miliar, tahun 2015 sebesar Rp 5.765 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp 6.663 Miliar, tahun 2017 sebesar Rp 7.764 Miliar,

dan tahun 2018 sebesar Rp 9.084 Miliar. Dengan demikian, dari tahun 2014 hingga 2018 jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS mengalami kenaikan sebesar Rp 4.079 Miliar.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2014-2018²⁷

Gambar 1.2
Grafik Nilai NPF BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia
Periode 2014-2018

Berdasarkan grafik 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa nilai NPF Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) masih dikatakan baik karena masih berada di bawah ambang batas NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Nilai NPF BUS berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2014 nilai NPF BUS adalah sebesar 4,95%, tahun 2015 sebesar 4,84%, tahun 2016 sebesar 4,42%, tahun 2017 sebesar 4,76%, dan tahun 2018 sebesar 3,26%. Adapun nilai NPF UUS pada tahun

²⁷“Statistik Perbankan Syariah 2014-2018” (On-line), tersedia di <http://www.ojk.co.id> (28 Februari 2019)

2014 adalah sebesar 2,55%, tahun 2015 sebesar 3,03%, tahun 2016 sebesar 3,49 %, tahun 2017 sebesar 2,11%, dan tahun 2018 sebesar 2,15%.

Meskipun jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS lebih sedikit, akan tetapi tingkat pembiayaan bermasalah pada BPRS lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pembiayaan bermasalah pada BUS dan UUS. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik nilai NPF BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia periode 2014 hingga 2018 pada gambar 1.2. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa nilai NPF BPRS sudah beberapa tahun selalu melebihi 5%. Nilai NPF BPRS pada tahun 2014 hingga 2017 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 nilai NPF BPRS adalah sebesar 7,89%, tahun 2015 sebesar 8,63%, tahun 2016 sebesar 8,63%, dan tahun 2017 sebesar 9,68%. Untuk tahun 2018 nilai NPF BPRS turun sebesar 0,38% menjadi 9,30%.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah termasuk pada BPRS dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah pada BPRS adalah krisis ekonomi atau terjadinya perubahan makroekonomi. Perkembangan ekonomi yang tidak pasti yang tercermin dari perubahan makroekonomi dapat menyebabkan penurunan atau bahkan kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah. Beberapa indikator makroekonomi yang mempunyai hubungan dengan tingkat pembiayaan bermasalah antara lain adalah Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah. Apabila suatu indikator

makroekonomi baik, maka akan berdampak baik bagi tingkat pembiayaan bermasalah. Akan tetapi apabila suatu indikator makroekonomi buruk, maka akan memberi pengaruh yang buruk pula terhadap tingkat pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.1
Perkembangan Produk Domestik Bruto, Inflasi, *BI Rate*, dan
Nilai Tukar Rupiah Periode 2008-2018

| Tahun | PDB (Milyar Rp) | Inflasi (%) | <i>BI Rate</i> (%) | Nilai Tukar Rupiah (Rp) |
|--------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 2008 | 4.948.688,40 | 11,06 | 9,25 | 10.950 |
| 2009 | 5.603.871,20 | 2,78 | 6,50 | 9.400 |
| 2010 | 6.864.133,10 | 6,96 | 6,50 | 8.991 |
| 2011 | 7.831.726,00 | 3,79 | 6,00 | 9.068 |
| 2012 | 8.615.704,50 | 4,30 | 5,75 | 9.670 |
| 2013 | 9.546.134,00 | 8,38 | 7,50 | 12.189 |
| 2014 | 10.569.705,30 | 8,36 | 7,75 | 12.440 |
| 2015 | 11.526.332,80 | 3,35 | 7,50 | 13.795 |
| 2016 | 12.406.774,10 | 3,02 | 4,75 | 13.436 |
| 2017 | 13.588.797,30 | 3,61 | 4,25 | 13.548 |
| 2018 | 14.837.357,50 | 3,13 | 6,00 | 14.481 |

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga berlaku selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2008, PDB Indonesia sebesar Rp 4.948,688 Triliun dan pada tahun 2018 mencapai Rp 14.837,357 Triliun. Dari tahun 2008 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.888.699,10 Triliun. Berbeda dengan PDB, tingkat inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) menunjukkan perubahan secara fluktuatif.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Kemampuan dan kelancaran dalam mengembalikan pinjaman dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat total pendapatan masyarakat yang dicerminkan oleh PDB, maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan mengecil karena masyarakat mampu untuk melunasi pinjamannya.²⁸

Secara umum inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus menerus sebagai akibat dari jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia (penawaran). Inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Saat terjadi inflasi, secara riil tingkat pendapatan masyarakat mengalami penurunan, hal ini akan mengakibatkan tingkat daya beli masyarakat juga akan menurun. Saat konsumsi akan barang dan jasa turun, artinya permintaan akan barang dan jasa juga menurun. Dengan asumsi tingkat penawaran konstan, maka akan berpengaruh terhadap tingkat penghasilan produsen. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kapasitas nasabah dalam hal ini produsen dalam pengembalian pinjamannya. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat akan menimbulkan kualitas

²⁸ Daisy Firmansari dan Noven Suprayogi, *Pengaruh Variabel ...*, h. 513.

pengembalian pinjaman semakin buruk bahkan bisa terjadi pembiayaan bermasalah.²⁹

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* dapat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS. Saat *BI Rate* naik, maka bank syariah akan ikut menyesuaikan tingkat bagi hasilnya. Hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung kenaikan *BI Rate* dijadikan *benchmark* oleh bank syariah, sehingga saat margin bagi hasil bank syariah semakin kompetitif dan mengalami kenaikan maka akan memicu meningkatnya pembiayaan bermasalah dikarenakan beban yang harus ditanggung mudharib semakin besar. Selain itu hal tersebut juga sesuai dengan teori margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan bank syariah dimana dalam penetapan margin dan nisbah, suku bunga bank konvensional dalam hal ini *BI Rate* digunakan sebagai salah satu rujukan oleh *Asset Liabilities Committee* bank syariah.³⁰

Nilai tukar atau sering disebut kurs adalah nilai mata uang negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Apabila nilai tukar rupiah turun, maka pihak bank akan menanggung risiko yang cukup tinggi. Ketika rupiah melemah, maka usaha nasabah bank akan berisiko mengalami penurunan jika bahan baku yang digunakan dalam usahanya

²⁹ Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia". (Jurnal I-Economic Vol.2 No.2, 2016), h. 25-26.

³⁰ Amir Hamzah, "Pengaruh Faktor Makro Ekonomi ...", h. 84.

berasal dari impor. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh nasabah dari kegiatan usaha yang dilakukan akan menurun yang dapat mengakibatkan nasabah tidak dapat membayar angsuran kepada bank. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah.³¹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh indikator makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan judul penelitian, **“PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI, BI RATE, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PEMBIYAAAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018)”**.

D. Batasan Masalah

Guna memperjelas ruang lingkup yang akan dibahas dan agar penelitian dilakukan secara fokus, maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah. Adapun variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan bermasalah yang dihitung menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

³¹ *Ibid.*, h. 77.

2. Bank syariah yang menjadi objek penelitian adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
3. Penelitian ini menggunakan data triwulan masing-masing variabel dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh produk domestik bruto, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2008-2018?
2. Bagaimana pengaruh produk domestik bruto, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2008-2018?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh produk domestik bruto, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2008-2018.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh produk domestik bruto, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2008-2018.
3. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat tentang perbankan syariah secara umum dan khususnya tentang pengaruh makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, akademisi, dan pihak lain mengenai pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan bermasalah.
 - b. Menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³² Adapun pengertian Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³³

Berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang

³² Kasmir, *Manajemen Perbankan ...*, h. 12-13.


³³ Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1.

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.³⁴ Perbedaan BUS dan UUS dengan BPRS adalah dalam kegiatan memberikan jasa BUS dan UUS juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun landasan hukum atau peraturan tentang perbankan syariah antara lain sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 283



...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (سورة البقرة: ٢ : ٢٨٣)

Artinya: ...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁵

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil salah satu poin penting, yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah baik pihak bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk

³⁴ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 49.

menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi dengan terbuka dan transparan tanpa ada kecurangan atau kebohongan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia

Beberapa undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah, antara lain.

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

c. Peraturan Bank Indonesia

Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja bank syariah di Indonesia, antara lain.

- 1) PBI No. 9/19/PBI/2007, yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah.
- 2) PBI No. 6/24/PBI/2004, yang berisi tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syaria'ah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat.

Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah.³⁶

³⁶ Muhammad, *Manajemen Perbankan ...*, h. 2.

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha.
- 2) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-'Imran ayat 130, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ (سورة آل عمران : ٣ : ١٣٠)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*³⁷

- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 66.

- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan dengan mengacu pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء: ٤: ٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁸

Setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

3. Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah adalah sebagai berikut.³⁹

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan) dimana jenis usaha

³⁸ Ibid., h. 83.

³⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2008, h.43.

tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi rakyat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif guna terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi dan menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

4. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁴⁰

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, investasi, dan obligasi. Dalam menghimpun dana, bank syariah menggunakan beberapa pola yaitu pola titipan dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, pola pinjaman dengan menggunakan akad *qardh*, dan pola bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁴¹

Masyarakat memercayai bank syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi dan menyimpan dana (uang) yang dimilikinya. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah akan mendapat keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasikan dimana besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank syariah serta sesuai dengan hasil yang diperoleh bank syariah. Imbalan yang

⁴⁰ Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2016, h. 30.

⁴¹ Ascarya, *Akad & Produk...* h. 111.

yang diberikan bank syariah tersebut bisa dalam bentuk bonus dalam hal dana yang dititipkan dan bagi hasil dalam hal dana yang diinvestasikan.⁴²

b. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atau pendapatan atas dana yang disalurkan tersebut sesuai dengan akad yang digunakan. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah berupa margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyaluran dana yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah berupa bagi hasil.⁴³

c. Pelayanan Jasa Bank

Disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank syariah juga memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Beberapa jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain adalah jasa pengiriman uang (transfer),

⁴² Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah...*, h. 31.

⁴³ *Ibid.*, h. 32.

pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, bank garansi, dan pelayanan jasa bank lainnya. Kegiatan pemberian pelayanan jasa bank tersebut merupakan kegiatan yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank yang disebut *fee based income*.⁴⁴

5. Produk-Produk Perbankan Syariah

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasional fungsi bank syariah. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah memiliki empat fungsi utama yaitu :

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/*shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial⁴⁵.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana

⁴⁴ *Ibid.*, h. 33.

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk ...*, h. 112.

(*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*).⁴⁶

a. Penghimpunan Dana

Produk-produk pendanaan bank syariah mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu giro, tabungan, deposito, dan sukuk.⁴⁷

1) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Akad yang digunakan dalam bank syariah adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*. *Wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-sewaktu.

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad yang digunakan dalam bank syariah adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fikih dan Keuangan*, Depok : Kharisma Putra Utama Offset, 2013, h. 97.

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan ...*, h. 15-19.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Akad yang digunakan dalam bank syariah adalah akad *mudharabah*.

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama.⁴⁸

b. Penyaluran Dana

Bank syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.⁴⁹ Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, *istishna*, ditujukan untuk memiliki barang.

⁴⁸ Ascarya, *Akad & Produk ...*, h. 118.

⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan ...*, h. 20.

- a) *Murabahah* diambil dari kata bahasa Arab *ar-ribbu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Secara istilah *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁵⁰
- b) *Salam* adalah salah satu bentuk akad jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian tersebut.⁵¹ Dalam hal ini, barang yang diperjual belikan belum ada atau pembelian barang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
- c) *Istishna* adalah suatu akad jual beli antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen). Akad *istishna* yang diterapkan dalam bank syariah adalah *istishna paralel*.⁵²

⁵⁰ Nurul Ikhsan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: GP Press Group, 2014), h. 231.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 243.

⁵² *Ibid.*, h. 253.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa dalam bentuk *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, ditujukan untuk mendapatkan jasa.

a) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵³

b) *Ijarah muntahiya bittamlik* ini disebut juga dengan *ijarah wa iqtina'* yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa, biasa dikenal dengan sebutan sewa beli.⁵⁴

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

a) *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (pencampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah, *musyarakah* adalah akad persekutuan dalam hal modal, keuntungan, dan pengelolaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian

⁵³ Nurul Ikhsan, *Perbankan Syariah ...*, h. 245.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 247.

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁵

- b) *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.⁵⁶

c. Pelayanan Jasa

Adapun produk layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah antara lain sebagai berikut.⁵⁷

1) *Letter of Credit* (L/C) Impor

Letter of credit impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Ada dua akad yang diterapkan dalam produk L/C, yaitu:

- a) *Wakalah bil ujarah*, akadnya dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan *qardh* atau *mudharabah* atau *hawalah*. *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan. Adapun *wakalah bil ujarah* adalah akad *wakalah* dengan memberikan imbalan/*fee/ujrah* kepada *wakil*.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 222.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 227.

⁵⁷ Muhamad, *Manajemen Perbankan ...*, h. 135.

b) *Kafalah*, yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

2) Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Akad yang diterapkan dalam bank garansi adalah akad *kafalah*.

3) Penukaran Valuta Asing

Penukaran valuta merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*) yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Akad yang diterapkan dalam penukaran valuta asing adalah akad *sharf*.

B. Pembiayaan pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat. Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang

dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.⁵⁸ Produk penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan (*financing*), yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan oleh bank syariah didasarkan pada akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad bagi hasil, dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*).

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵⁹

a. Lancar

Pembiayaan dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang

⁵⁸ *Ibid.*, h. 135.

⁵⁹ Trisadini, P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 105.

lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

e. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

3. Pelaksanaan Pembiayaan dalam Bank Syariah

a. Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan di Bank Syariah

Dalam melaksanakan pembiayaan di bank syariah, pejabat bank harus kredibel dan profesional. Kredibilitas sebuah bank syariah berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada bank berkenaan dengan dana titipan nasabah kepada bank dan dana yang nasabah manfaatkan. Kredibilitas bank syariah antara lain meliputi:⁶⁰

- 1) Kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah
- 2) Kesiediaan untuk berposisi “sama-menang” dengan nasabah
- 3) Ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang berlaku
- 4) Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan/perkembangan lembaga
- 5) Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus
- 6) Kesehatan struktur permodalan lembaga tersebut
- 7) Perkembangan kinerja bisnis/usahanya

Profesionalitas adalah suatu nilai praktis berwujud keandalan dalam mengelola sebuah organisasi dan kecekatan dalam menjalankan kegiatan. Profesionalitas bank syariah antara lain meliputi:⁶¹

- 1) Kerapian pengelolaan organisasi dan lembaga yang bersangkutan
- 2) Kesepadanan struktur organisasi dalam kegiatan yang dijalankan

⁶⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan ...*, h. 168.

⁶¹ *Ibid.*, , h. 168-169.

- 3) Kepakaran dalam menangani kegiatan usaha yang dijalankan
- 4) Ketersediaan sistem dalam mekanisme dan menanggapi nasabah
- 5) Kesigapan dalam menangani dan menanggapi nasabah
- 6) Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai
- 7) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatannya

b. Pelaksana Pembiayaan Bank Syariah dan Tugasnya

Pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah umumnya dicakup dalam bagian pemasaran. Adapun tugas pokok bidang pemasaran adalah sebagai berikut.⁶²

- 1) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas pemasaran dan pembiayaan
- 2) Melakukan *monitoring*, evaluasi, *review* dan supervise terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran (pembiayaan) pada unit atau bagian yang berada di bawah supervisinya
- 3) Bertindak sebagai Komite Pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan
- 4) Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan melakukan *review* terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan
- 5) Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada Direksi mengenai masalah yang berkaitan dengan bidang *marketing* dan pembiayaan

⁶² *Ibid.*, , h. 172.

- 6) Melayani, menerima tamu secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan
- 7) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah
- 8) Menyusun strategi *planning* dan selaku *marketing* atau solisitasi nasabah
- 9) Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah
- 10) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari

c. Petugas-Petugas Pembiayaan pada Bank Syariah

Petugas-petugas pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut.⁶³

1) *Account Officer* (A/O)

Account Officer (A/O) atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon nasabah pembiayaan atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah. Selanjutnya membina nasabah pembiayaan tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya.

2) *Bagian Support* Pembiayaan

Bersama dengan A/O mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya.

⁶³ *Ibid.*, h. 173.

3) Bagian Administrasi Pembiayaan

Bagian administrasi menangani setiap proses pembiayaan hingga setelah pemohon menjadi nasabah, mulai dari pencairan dana sampai dengan pelunasan atau pembayaran.

4) Bagian Pengawasan Pembiayaan

Bagian pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah dan penagihan-penagihan. Disamping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurus *file* nasabah.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan tentu akan dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Bank syariah bisa merencanakan suatu kegiatan usaha seperti melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, namun bank tidak bisa memastikan apa yang akan didapatkan, apakah untung atau rugi. Allah SWT. berfirman dalam surat Luqman (31) ayat 34.

... وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ (سورة لقمان : ٣١ : ٣٤) ط

Artinya : ... dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok⁶⁴

Risiko yang dihadapi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan disebut dengan risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 414.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitas didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaan.⁶⁵ Pembiayaan bermasalah juga dapat diartikan sebagai pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah, tetapi di dalam pembiayaan tersebut pembayaran yang dilakukan oleh pihak nasabah kepada bank saat jatuh tempo mengalami kendala (tidak lancar).

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.⁶⁶ Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah dikenal dengan istilah NPF (*Non Performing Finance*). NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih.⁶⁷

Rumus yang digunakan dalam menghitung NPF adalah sebagai berikut.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

⁶⁵ Trisadini, P., *Transaksi Bank ...*, h.105.

⁶⁶ Mutaminah, Siti Nur Zaidah Chasanah, "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia". (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 19, No.12, 2012), h. 51.

⁶⁷ Imam Asngari, "Pengaruh Kondisi Ekonomi Makro dan Karakteristik Bank Terhadap Efisiensi Industri Perbankan Syariah di Indonesia". (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.1, No.2, 2013), h. 99.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, menetapkan bahwa besarnya rasio NPF maksimal 7% dari total pembiayaan.

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Beberapa penyebab munculnya permasalahan dalam pembiayaan antara bank dan nasabah adalah sebagai berikut.⁶⁸

a. Dari Pihak Internal Bank

- 1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat
- 2) Kuantitas, kualitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai
 - a) Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia di bank sementara jumlah nasabah pembiayaan begitu banyak dengan jangkauan wilayah yang luas
 - b) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat/berlebihan
 - c) Adanya pengelola yang menerima suap atau hadiah-hadiah baik dalam bentuk uang maupun barang agar mau mempermudah proses dan besarnya jumlah pembiayaan
 - d) Kelemahan organisasi, sistem, dan prosedur pembiayaan
 - e) Prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung

⁶⁸ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Parama Publishing, 2012, h. 117-121

- 3) Pihak bank kurang teliti dalam pembuatan akad pembiayaan yang ternyata banyak cela atau multitafsir dari bunyi klausul-klausul akad

b. Dari Pihak Nasabah

- 1) Aspek karakter (itikad tidak baik) nasabah
- 2) Aspek operasionalisasi dan manajemen usaha nasabah
- 3) Aspek legal dan yuridis
- 4) Aspek agunan

c. Dari Pihak Eksternal Bank

- 1) Krisis ekonomi atau terjadinya perubahan makroekonomi
- 2) Adanya perubahan regulasi oleh pemerintah maupun instansi terkait yang berwenang lainnya yang diberlakukan untuk bank dan nasabah
- 3) Bencana alam dan/atau gangguan keamanan yang menimpa nasabah
- 4) Nasabah tiba-tiba sakit keras sehingga tidak dapat menjalankan usaha
- 5) Nasabah meninggal dunia padahal tidak memiliki ahli waris atau memiliki ahli waris namun tidak mampu membayar hutang-hutangnya

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut.⁶⁹

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dengan bank. Dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif.
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak nasabah tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut dengan penyelesaian secara paksa.

a. Sumber-sumber Penyelesaian Pembiayaan

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa.⁷⁰

- 1) Barang-barang yang dijaminkan nasabah kepada bank. Hal ini dalam fikih didasarkan pada prinsip *rahn*.
- 2) Jaminan perorangan baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Hal ini dalam fikih didasarkan pada prinsip *kafalah*.
- 3) Seluruh harta kekayaan nasabah dan pemberi jaminan termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (jika ada). Dalam fikih hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW, yang memiliki arti sebagai berikut: Dari Ka'ab bin Malik

⁶⁹ Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A., *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 94-95

⁷⁰ *Ibid.*, h. 95

“Sesungguhnya Nabi SAW. pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya” (HR. Imam Daruquthni).

- 4) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang nasabah. Dalam fikih didasarkan pada prinsip *hawalah* dan *kafalah*.

b. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank syariah antara lain adalah sebagai berikut.

1) Penyelesaian oleh Bank Syariah Sendiri

Penyelesaian oleh bank syariah sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya dilakukan penagihan pengembalian pembiayaan macet yang dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif. Apabila tahap pertama tidak berhasil, maka bank syariah melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah, berupa peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tahap kedua belum juga berhasil, maka bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari nasabah/pemilik agunan.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*, h. 96

2) Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank syariah dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector* untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Hal tersebut tentu dilakukan dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.⁷²

3) Penyelesaian Melalui Kantor Lelang

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:⁷³

- a) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji.
- b) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate eksekusi*
- c) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

4) Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (*Al-qadha*)

⁷² *Ibid.*, h. 97

⁷³ *Ibid.*, h. 97-98

Penyelesaian melalui badan peradilan dilakukan dengan cara sebagai berikut.⁷⁴

- a) Gugat perdata melalui pengadilan agama
 - b) Eksekusi agunan melalui pengadilan agama/pengadilan negeri
 - c) Permohonan pailit melalui pengadilan niaga
- 5) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase (*Tahkim*)

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah bank syariah dengan nasabah. Lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet apabila dalam perjanjian atau akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa.

Mengingat sengketa perbankan syariah adalah sengketa perdata dalam bidang bisnis yang merupakan kewenangan arbitrase, maka penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan Badan Arbitrase Syariah. Pada saat ini Badan Arbitrase Syariah hanya ada satu, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, h. 98-100

⁷⁵ *Ibid.*, h. 100-101

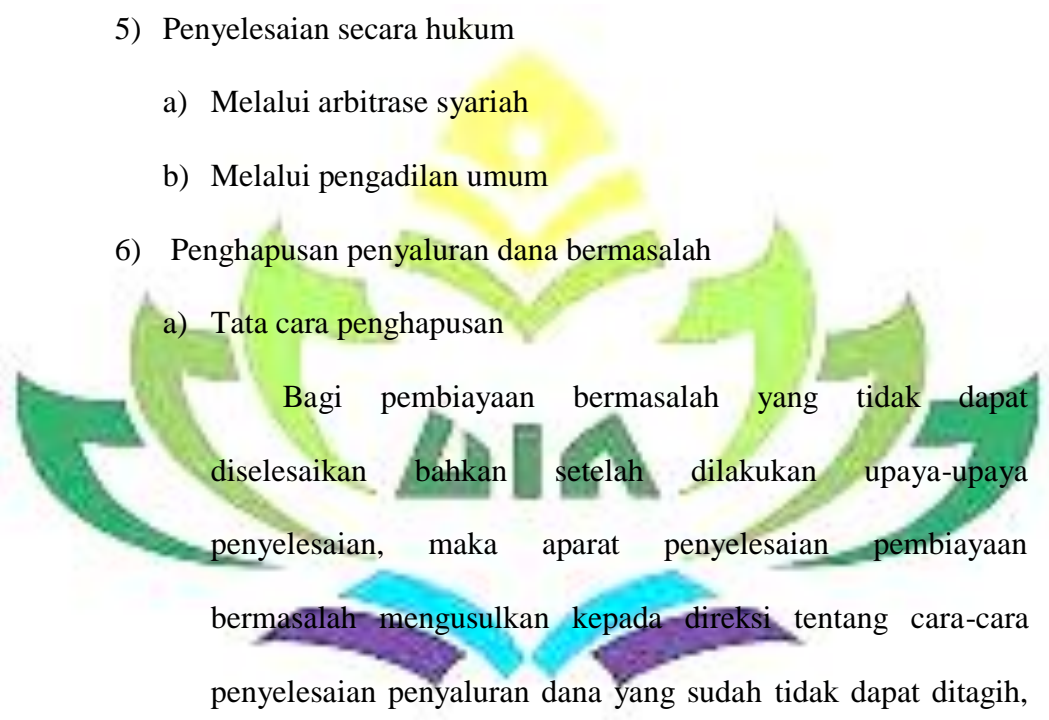
c. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berikut langkah-langkah bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.⁷⁶

- 1) Inventarisasi nasabah penyaluran dana bermasalah, antara lain:
 - a) Melihat kondisi usaha
 - b) Melihat data historis pemenuhan kewajiban nasabah
 - c) Melihat kondisi jaminan secara fisik dan aspek legalnya
 - d) Analisis terhadap nasabah penyaluran dana bermasalah
 - e) Melakukan analisis penyebab timbulnya penyaluran dana bermasalah
 - f) Melakukan analisis usaha
 - g) Melakukan analisis yuridis
 - h) Menilai kembali jaminan
 - i) Melakukan tindakan pembinaan
 - j) Melakukan tindakan administratif berupa surat peringatan
 - k) Melakukan kunjungan
 - l) Melakukan pembinaan administrasi manajemen
- 2) Restrukturisasi
 - a) *Resceduling* (penjadwalan kembali)
 - b) *Reconditioning* (persyaratan kembali)
 - c) *Restructuring* (penataan kembali)

⁷⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan ...*, h. 162-163

- 3) Monitoring atas pelaksanaan pembinaan
 - a) *On desk monitoring*
 - b) *On site monitoring*
- 4) Eksekusi jaminan, (khusus untuk produk bagi hasil) hanya dapat dilakukan jika nasabah melakukan pelanggaran terhadap akad
 - a) Eksekusi secara sukarela
 - b) Eksekusi secara paksa
- 5) Penyelesaian secara hukum
 - a) Melalui arbitrase syariah
 - b) Melalui pengadilan umum
- 6) Penghapusan penyaluran dana bermasalah
 - a) Tata cara penghapusan



Bagi pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan bahkan setelah dilakukan upaya-upaya penyelesaian, maka aparat penyelesaian pembiayaan bermasalah mengusulkan kepada direksi tentang cara-cara penyelesaian penyaluran dana yang sudah tidak dapat ditagih, aparat penyelesaian penyaluran dana melaksanakan penyelesaian penyaluran dana yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui, daftar penyaluran dana yang tidak dapat ditagih serta cara penyelesaian wajib segera dilimpahkan kepada dewan komisaris.

b) Membentuk satuan kerja

Satuan kerja dibentuk bank apabila kualitas dan kuantitas penyaluran pembiayaan bermasalah meningkat. Adapun tugas satuan kerja adalah melakukan koordinasi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pihak terkait. Satuan ini dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi.

D. Produk Domestik Bruto (PDB)

1. Pengertian Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) dalam bahasa Inggrisnya *Gross Domestic Product* (GDP) diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu.⁷⁷ PDB mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah negara (domestik) tanpa membedakan kepemilikan/kewarganegaraan pada suatu periode tertentu.⁷⁸ Pendekatan nasional memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah negara. Pada waktu pendapatan nasional naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk.

2. Metode Perhitungan Produk Domestik Bruto

Perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

⁷⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori ...*, h. 34.

⁷⁸ Tedy Herlambang, et. Al., *Ekonomi Makro Teori, Analisis, dan Kebijakan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 22.

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan tahunan).

b. Pendekatan Pengeluaran

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- 2) pengeluaran konsumsi LNPRT
- 3) pengeluaran konsumsi pemerintah
- 4) pembentukan modal tetap domestik bruto
- 5) perubahan inventori
- 6) ekspor barang dan jasa
- 7) impor barang dan jasa.

c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Dari ketiga metode tersebut yang sering digunakan adalah metode pengeluaran/penggunaan, dalam metode ini Produk Domestik Bruto dibedakan menjadi empat komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I),

belanja pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Produk Domestik Bruto dapat dirumuskan menjadi (PDB) dapat dirumuskan menjadi:⁷⁹

$$GDP = C + I + G (X-M)$$

Keterangan:

C : Pengeluaran konsumsi barang dan jasa pribadi

I : Investasi

G : Pengeluaran untuk belanja pemerintah baik dari konsumsi dan investasi

X : Mewakili ekspor

M : Mewakili impor

3. PDB dalam Ekonomi Islam

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu penggunaan parameter *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaninya. Karena itu, seluruh kegiatan ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik jasadiyah melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani dimana roh merupakan esensi manusia.⁸⁰

Setidaknya ada 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat

⁷⁹ Kristiai Naiboho, Sri Mangesti Rahayu, *Pengaruh GDP ...*, h. 90-91.

⁸⁰ Muhammad Syahbudi, *Buku Diktat Ekonomi Makro Perspektif Islam* (Medan : FEBI UIN Sumatera Utara, 2018), h. 34.

kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. Empat hal tersebut adalah sebagai berikut.⁸¹

- 
- a. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Di dalam GNP konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok. Maka untuk lebih mendekatkan pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat dibanding produksi barang-barang mewah.
 - b. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan.
 - c. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai presentase total konsumsi.
 - d. Perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antarsaudara dan sedekah adalah penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal sedekah antarsaudara.

4. Hubungan PDB dengan Pembiayaan Bermasalah

Salah satu indikator dalam menjaga stabilitas perekonomian adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB ini mencerminkan kapasitas keluaran

⁸¹ *Ibid.*, h. 34-35.

yang dapat dihasilkan perekonomian dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada dalam perekonomian. Kaitannya dengan pembiayaan bermasalah, dalam kondisi resesi dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan individu maupun perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan individu maupun perusahaan dalam mengembalikan pinjaman.⁸²

E. Inflasi

1. Pengertian dan Jenis-jenis Inflasi

Inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus menerus. Dengan demikian, syarat terjadinya inflasi ada tiga yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung secara terus-menerus. Laju inflasi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut.⁸³

$$\text{Laju inflasi tahun } t = \frac{(\text{Tingkat harga tahun } t) - (\text{Tingkat harga tahun } t - 1)}{(\text{Tingkat harga tahun } t - 1)}$$

Berdasarkan kepada sumber dan penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk berikut:⁸⁴

a. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebih ini akan menimbulkan inflasi.

⁸² Kristiani Naibaho, Sri Mangesti Rahayu, "Pengaruh GDP, Inflasi ...", h. 89.

⁸³ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* ..., h. 186-187.

⁸⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori* ..., h. 333-336

b. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi ini berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berubah menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

c. Inflasi Diimpor

Inflasi diimpor bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan tingkat kualitas parah atau tidaknya, inflasi dibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut.⁸⁵

a. Inflasi Ringan

Inflasi ringan atau inflasi merangkak (*creeping inflation*) adalah inflasi yang lajunya kurang dari 10% per tahun, inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan.

⁸⁵ Nurlaili, *Analisis Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2011-2013*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 64

b. Inflasi Sedang

Inflasi ini memiliki ciri yang lajunya berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Tingkat sedang ini sudah mulai membahayakan kegiatan ekonomi.

c. Inflasi Berat

Inflasi berat adalah inflasi yang lajunya antara 30% sampai 100% per tahun, kenaikan harga sulit dikendalikan.

d. Inflasi liar (*hyperinflation*)

Inflasi liar adalah inflasi yang lajunya sudah melebihi 100% per tahun. Inflasi ini terjadi apabila setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot dimana keadaan ini disebut inflasi yang tidak terkendali (*hyperinflation*).

2. Dampak Inflasi

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan.
- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat;
- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah;

- d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

Selain itu, inflasi juga mengakibatkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akuntansi, seperti:⁸⁶

- a. Apakah penilaian terhadap aset tetap dan aset lancar dilakukan dengan metode biaya historis atau metode biaya aktual
- b. Pemeliharaan modal riil dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner
- c. Inflasi menyebabkan dibutuhkan koreksi dan rekonsiliasi operasi (index) untuk mendapatkan kebutuhan perbandingan waktu dan tempat

3. Inflasi dalam Ekonomi Islam

Inflasi tidak dikenal dalam Islam, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Namun, dinar dan dirham disini adalah dalam artian yang sebenarnya yaitu yang dalam bentuk emas maupun perak bukan dinar dan dirham yang sekedar nama. Syekh An-Nabhani memberikan alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah emas. Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan.⁸⁷

⁸⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro ...*, h. 139

⁸⁷ Muhammad Syahbudi, *Buku Diktat Ekonomi Makro ...*, h. 83.

- a. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah, ketika Islam mewajibkan diat, maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas.
- b. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
- c. Ketika Allah SWT. mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak.
- d. Hukum-hukum tentang penukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitupun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak.

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar atau mengalami penurunan. Diantaranya, akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar.

Menurut Al-Maqrizi inflasi terbagi dua, yaitu :⁸⁸

- a. Inflasi Akibat Berkurangnya Persediaan Barang

Inflasi inilah yang terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan.

- b. Inflasi Akibat Kesalahan Manusia

⁸⁸ *Ibid.*, h. 83

Inflasi ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang berlebihan. Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang terjadi.

4. Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan Bermasalah

Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi pertumbuhan sektor riil menyebabkan terjadinya inflasi karena mengakibatkan daya beli uang selalu menurun. Risiko daya beli yang dihadapi berupa nilai riil dari uang yang dipinjamkan menjadi lebih kecil daripada yang diharapkan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, bank syariah bersikap hati-hati dalam memberikan pembiayaan.

Inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara mikro maupun makro termasuk kegiatan pembiayaan. Saat terjadi inflasi, daya beli masyarakat akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun. Saat konsumsi akan barang dan jasa menurun, artinya permintaan akan barang dan jasa juga menurun. Dengan asumsi tingkat penawaran konstan, maka pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat penghasilan produsen sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kapasitas nasabah dalam hal ini produsen dalam melakukan pengembalian pinjamannya. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat akan menimbulkan kualitas pembiayaan semakin buruk bahkan terjadi pembiayaan bermasalah.⁸⁹

⁸⁹ Dinnul Alfian Akbar, "Inflasi, *Gross Domestic Product* ...", h. 25-26.

F. *BI Rate*

1. Pengertian *BI Rate*

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.⁹⁰ Suku bunga (*BI Rate*) merupakan faktor yang utama dalam aktifitas bank, baik suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan. Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi.⁹¹

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan *BI Rate*. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen *BI 7-Day (Reserve) Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di

⁹⁰ Kristiani Naibaho dan Sri Mangesti Rahayu, *Pengaruh GDP ...*, h. 91.

⁹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 155.

pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrument repo.⁹²

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penerapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut.⁹³

a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing.

c. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman.

d. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank.

e. Jangka waktu

⁹² “BI Rate” (On-line), tersedia di <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7-day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx> (11 Februari 2019)

⁹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan ...*, h. 155.

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang.

f. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan.

g. Reputasi perusahaan

Bonafidisitas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya.

h. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran.

i. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder).

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit.

3. *BI Rate* dalam Ekonomi Islam

Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrument bunga. Dalam perekonomian kapitalis tingkat bunga seringkali berfluktuasi, yang sengaja hanya disimpan pun akan terus menerus berubah. Kewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dan penghapusan bunga per tahun tidak hanya dapat meminimalisasi permintaan spekulatif akan uang maupun penyimpanan uang yang diakibatkan oleh tingkat bunga, melainkan juga memberikan stabilitas yang lebih tinggi terhadap permintaan uang. Dalam sistem ekonomi Islam, bank sentral harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk membiayai pertumbuhan dalam *output* jangka menengah dan panjang demi mencapai harga yang stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam.⁹⁴

4. Hubungan *BI Rate* dengan Pembiayaan Bermasalah

BI Rate menjadi bagian yang diperhitungkan manajemen bank syariah untuk menentukan porsi bagi hasil. Kenaikan *BI Rate* akan menurunkan dana pihak ketiga bank syariah karena *BI Rate* akan mempengaruhi peningkatan tingkat bunga bank konvensional. Di lain pihak, kenaikan *BI Rate* akan meningkatkan pembiayaan bank syariah karena pembiayaan bank syariah lebih murah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Kenaikan *BI Rate* yang berdampak pada peningkatan pembiayaan bank syariah tersebut dapat meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah.⁹⁵

⁹⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam* (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 105.

⁹⁵ Indri Supriani, Heri Sudarsono, *Analisis Pengaruh ...*, h. 6.

G. Nilai Tukar Rupiah

1. Pengertian Nilai Tukar (Kurs)

Exchange Rates (nilai tukar uang) atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*) atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing.⁹⁶

Kebijakan nilai tukar uang dalam Islam menganut sistem *Managed Floating*, dimana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah (bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri) karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa suatu nilai tukar yang stabil merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat.⁹⁷

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar (kurs) adalah sebagai berikut.⁹⁸

a. *Balance of Payment* (BOP) atau Neraca Pembayaran

⁹⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro ...*, h. 157.

⁹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi ...*, h. 116.

⁹⁸ Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 90-92.

Jika BOP surplus, maka akan berakibat naik atau menguatnya nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan. Karena dengan surplusnya BOP negara tersebut berarti akan meningkatkan demand terhadap mata uang negara tersebut atau bertambahnya devisa atau valuta asing yang masuk sehingga menambah *supply* di negara yang neraca pembayarannya mengalami surplus. Demikian pula sebaliknya jika terjadi defisit, maka akan mengakibatkan melemahnya nilai tukar mata uang yang bersangkutan.

b. Tingkat Bunga

Apabila suku bunga cenderung naik maka dampaknya banyak investor akan menginvestasikan dananya pada mata uang tersebut, berarti permintaan terhadap mata uang meningkat dan pengaruhnya adalah kurs mata uang negara tersebut menguat atau naik.

c. Bank Sentral

Bank sentral dapat melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar mata uangnya (*Local Currency*) dengan cara membeli atau menjual devisa atau valuta asing yang dimilikinya. Di Indonesia misalnya, Bank Indonesia menghendaki nilai IDR stabil atau menguat maka tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan cara menjual USDnya di pasar, sehingga *supply* USD bertambah dan akhirnya IDR bisa menguat.

d. *Political Development*

Kondisi politik di suatu negara juga akan mempengaruhi nilai tukar mata uangnya, suatu negara yang kondisi politiknya stabil maka nilai tukar mata uangnya akan stabil, tetapi bila terjadi *instability* di bidang politik maka nilai tukar mata uangnya akan fluktuatif.

e. *Speculation*

Kegiatan untuk kepentingan spekulasi yang dilakukan oleh para *dealer* dan *broker* juga dapat mempengaruhi naik turunnya nilai tukar. Berarti pada hakikatnya kegiatan spekulasi dapat menjernihkan nilai tukar pada kondisi yang sesungguhnya, yaitu *clear market*.

f. *Unemployment*

Meningkatnya jumlah pengangguran mengakibatkan menurunnya nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan. Karena dengan jumlah pengangguran yang meningkat berarti mengurangi tingkat produktifikasi yang dapat mengakibatkan turunnya surplus atau menambah defisit neraca pembayaran.

g. *Market Sentiment*

Sentimen pasar sangat dipengaruhi oleh ekspektasi para pelaku pasar terhadap kondisi atau kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah setempat. Jika terjadi sentimen yang negatif artinya bahwa nilai tukar akan mengalami penurunan, tetapi bila sentiment pasarnya positif maka nilai tukarnya akan menguat. Sentiment pasar juga dapat mencerminkan kondisi atau kebijakan yang ditempuh apakah sesuai

atau tidak dengan harapan masyarakat secara umum, terutama para pelaku pasar.

3. Nilai Tukar dalam Ekonomi Islam

Kebijakan nilai tukar uang dalam Islam menganut sistem *Managed Floating*, dimana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah (bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri) karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa suatu nilai tukar yang stabil merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat.⁹⁹

4. Hubungan Nilai Tukar Rupiah dengan Pembiayaan Bermasalah

Kurs digunakan untuk mengukur nilai rupiah terhadap dolar Amerika yang digunakan sebagai patokan devisa. Apabila kurs meningkat, berarti nilai rupiah terhadap dolar relatif meningkat. Kenaikan nilai rupiah akan menurunkan pendapatan perusahaan karena kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan naiknya biaya produksi. Keadaan ini yang menyebabkan pengusaha cenderung mengurangi modal yang diperoleh dari pembiayaan di bank. Di lain pihak, bank akan menghadapi meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah karena meningkatnya biaya produksi.¹⁰⁰

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Amir Hamzah (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian

⁹⁹ Adiwarnan A. Karim, *Ekonomi Makro ...*, h. 168.

¹⁰⁰ Indri Supriani, Heri Sudarsono, *Analisis Pengaruh ...*, h. 6-7.

pada bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari inflasi, *BI Rate* dan nilai tukar, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan bermasalah. Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang berjumlah 12 Bank. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 5 Bank Umum Syariah dengan periode penelitian selama 7 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2017, sehingga data observasi penelitian berjumlah 35. Hasil Penelitian ini yaitu : inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF); *BI Rate* dan nilai tukar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir Hamzah (2018) terletak pada objek penelitiannya. Penulis menggunakan objek penelitian berupa BPRS di Indonesia yang terdapat dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang berjumlah 167 BPRS per Desember 2018. Selain itu, penulis menambahkan 1 variabel independen yaitu Produk Domestik Bruto (PDB).

2. Kristiani Naibaho dan Sri Mangesti Rahayu (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh GDP, Inflasi, *BI Rate*, Nilai Tukar Terhadap *Non Performing Loan* Bank Umum Konvensional di Indonesia (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi dari masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 42 bank umum konvensional di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 23 bank umum konvensional di Indonesia yang diperoleh melalui metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian ini yaitu : Berdasarkan hasil Uji F diketahui bahwa *GDP* (X_1), inflasi (X_2), *BI Rate* (X_3), nilai tukar (X_4) berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Non Performing Loan Bank Umum Konvensional di Indonesia* (Y); Berdasarkan hasil perhitungan Uji Parsial (Uji t), diketahui bahwa terdapat pengaruh dan nilai negatif signifikan dari *GDP* (X_1) terhadap *NPL Bank Umum Konvensional*. Adapun Inflasi (X_2), *BI Rate* (X_3), dan Nilai Tukar (X_4) masing-masing terdapat pengaruh signifikan positif terhadap *NPL Bank Umum Konvensional*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada objek penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan objek Bank Umum Konvensional Indonesia sedangkan penulis menggunakan BPRS di Indonesia yang terdapat dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS).

3. Dinnul Alfian Akbar (2016) melakukan penelitian dengan judul “Inflasi, *Gross Domestic Product* (*GDP*), *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*), dan *Finance To Deposit Ratio* (*FDR*) Terhadap *Non Performing Financing* (*NPF*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Populasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di direktori Bank Indonesia periode 2010-2014 yaitu sebanyak 12 Bank Syariah. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, tercatat ada enam sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu : inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF; GDP, inflasi, CAR dan FDR secara parsial berpengaruh negatif terhadap NPF; inflasi, GDP, CAR, dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap NPF.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada sampel penelitiannya. Penulis menggunakan sampel BPRS di Indonesia yang terdapat dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS). Selain itu, variabel independen yang digunakan oleh penulis adalah produk domestik bruto, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah.

4. Daisy Firmansari dan Noven Suprayogi (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Spesifik Bank Terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2003-2014”. Variabel independen dalam penelitian adalah GDP, inflasi, dan FDR. Adapun variabel dependen yang digunakan adalah NPF. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa GDP dan inflasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, FDR memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Secara

simultan GDP, inflasi dan FDR memiliki pengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terdapat pada objek penelitian yang digunakan. Penulis menggunakan objek penelitian BPRS di Indonesia yang terdapat pada Statistik Perbankan Syariah (SPS). Selain itu, perbedaan juga terdapat pada variabel independen yang digunakan. Penulis menggunakan variabel independen berupa produk domestik bruto, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah.

5. Nurismalatri (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Kredit Bermasalah Perbankan Indonesia”. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan pengamatan langsung terhadap data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda yang menggunakan data *time series* periode Januari 2012 sampai Desember 2016. Variabel independen dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah, *BI Rate*, dan inflasi. Adapun variabel dependennya adalah kredit bermasalah yang diukur dengan rasio NPL. Penelitian ini menggunakan data NPL perbankan Indonesia dan data indikator makro ekonomi periode 2012-2016. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh data *time series* sebanyak 60 data bulanan. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa nilai tukar rupiah, *BI Rate* dan inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap NPL Perbankan Indonesia. Sedangkan secara parsial, nilai tukar

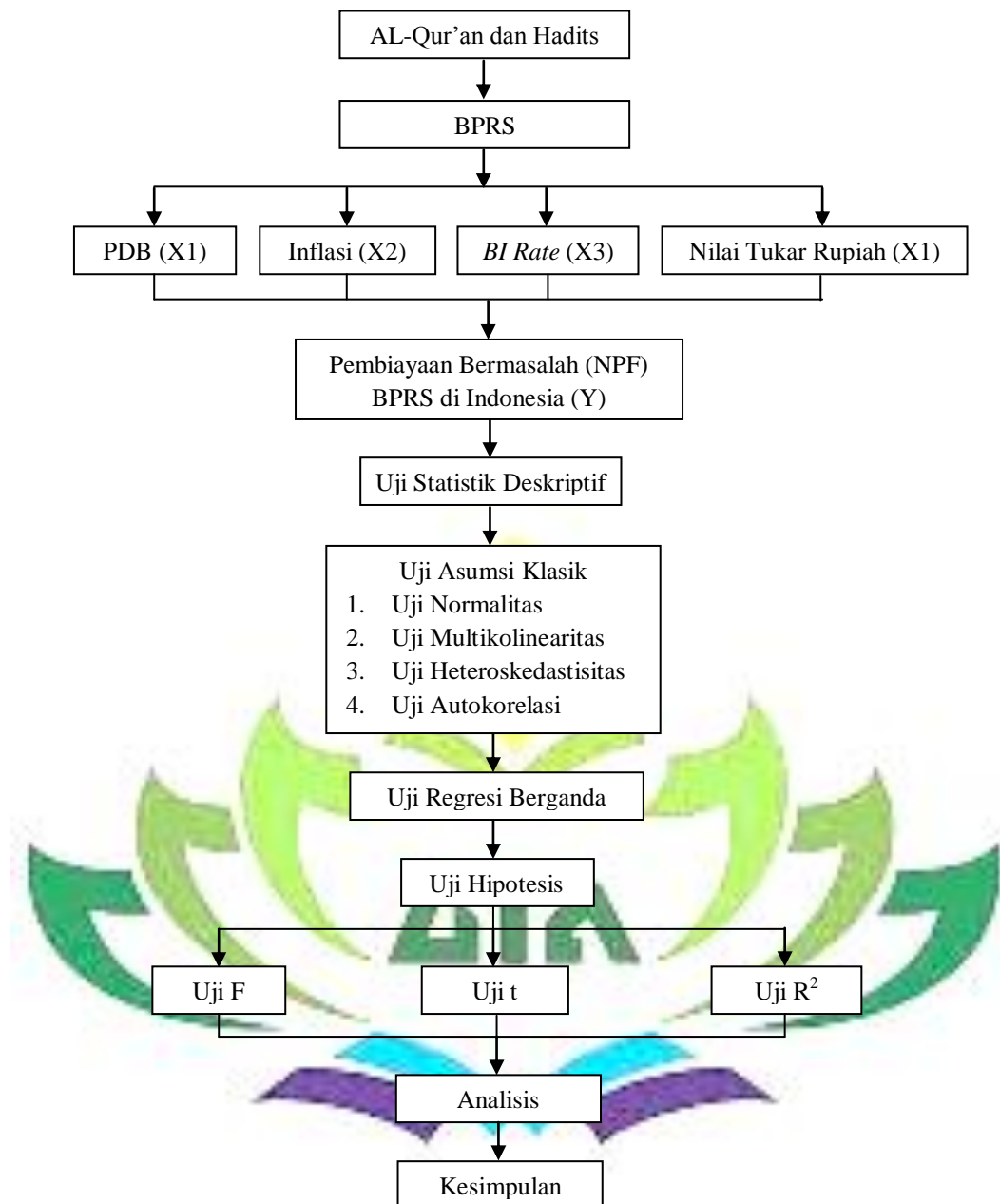
rupiah berpengaruh positif, *BI Rate* dan inflasi berpengaruh negatif terhadap NPL Perbankan Indonesia.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terdapat pada objek penelitiannya. Penulis menggunakan BPRS di Indonesia yang terdapat pada Statistik Perbankan Syariah (SPS). Selain itu, penulis juga menambahkan 1 variabel independen, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB).

J. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁰¹ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh produk domestik bruto, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan bermasalah yang diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 60.



Gambar 3. Kerangka berpikir

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis perbankan syariah yang ada di Indonesia. BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam melakukan salah satu kegiatannya yaitu penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, BPRS memiliki

risiko berupa pembiayaan bermasalah dimana tingkat pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Beberapa indikator makro ekonomi seperti PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah pada BPRS.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah. Data variabel independen yang digunakan diperoleh dari website resmi Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Adapun variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan bermasalah yang diukur dengan rasio NPF. Data NPF BPRS diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dibuplikasikan oleh OJK. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Analisis hasil penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji simultan (Uji F), uji parsial (Uji t), dan uji koefisien determinasi (R^2). Setelah dilakukan beberapa pengujian terhadap variabel dependen dan independen, maka selanjutnya dilakukan analisis yang kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan.

K. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.¹⁰²

1. Pengaruh Produk Domesik, Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah secara Parsial terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018

a. Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Pembiayaan Bermasalah

Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Kemampuan dan kelancaran dalam mengembalikan pinjaman dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat total pendapatan masyarakat yang dicerminkan oleh PDB, maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan mengecil karena masyarakat mampu untuk melunasi pinjamannya.¹⁰³

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiani Naibaho dan Sri Mangesti Rahayu (2018) menunjukkan hasil bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_1 :Produk domestik bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018.

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 63.

¹⁰³ Daisy Firmansari, Noven Suprayogi, *Pengaruh Variabel ...*, h. 513.

b. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah

Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan.¹⁰⁴ Syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dalam keadaan negara mengalami inflasi, maka harga-harga barang akan menjadi naik. Kenaikan harga barang ini akan mempengaruhi nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan dari bank, karena dana yang seharusnya digunakan untuk mengangsur digunakan untuk membeli barang kebutuhan yang harganya meningkat. Adanya inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah, karena daya beli masyarakat akan turun. Turunnya daya beli masyarakat akan mempengaruhi pendapatan produsen. Hal ini akan menyebabkan produsen akan kesulitan dalam membayar angsuran pengembalian pembiayaannya.¹⁰⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiani Naibaho dan Sri Mangesti Rahayu (2018) menunjukkan hasil bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₂ :Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018.

¹⁰⁴ Kristiani Naibaho, Sri Mangesti Rahayu, *Pengaruh GDP ...*, h. 91.

¹⁰⁵ Amir Hamzah, *Pengaruh Faktor Ekonomi ...*, h.76.

c. Pengaruh *BI Rate* terhadap Pembiayaan Bermasalah

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.¹⁰⁶ Meskipun suku bunga digunakan untuk operasi bank konvensional, namun bank syariah tidak bisa lepas dari penetapan suku bunga. Suku bunga bank konvensional dijadikan sebagai rujukan oleh *Asset Liabilitas Committee* bank syariah dalam menetapkan margin dan nisbah. Jika *BI Rate* turun, maka margin bank syariah menjadi lebih tinggi dari bank konvensional. Hal ini akan menyebabkan nasabah dapat beralih ke bank konvensional.¹⁰⁷ Dengan demikian jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan menurun yang dapat menyebabkan berkurangan tingkat pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Kurniasih Fauziyah (2015) menunjukkan hasil bahwa *BI Rate* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₃ : *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018.

d. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Pembiayaan Bermasalah

Nilai tukar, lebih umumnya *Exchange Rates* (nilai tukar uang) atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah

¹⁰⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*, h. 186.

¹⁰⁷ Kristiani Naibaho Sri Mangesti Rahayu, *Pengaruh GDP ...*, h.76-77.

catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*) atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing.¹⁰⁸ Apabila nilai tukar rupiah turun, maka pihak bank akan menanggung risiko yang cukup tinggi. Ketika rupiah melemah, maka usaha nasabah bank akan berisiko mengalami penurunan jika bahan baku yang digunakan dalam usahanya berasal dari impor. Hal ini dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah.¹⁰⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Amir Hamzah (2018) menunjukkan hasil bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₄ :Nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS di Indonesia Periode 2008-2018.

¹⁰⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan ...*, h. 123.

¹⁰⁹ Kristiani Naibaho Sri Mangesti Rahayu, *Pengaruh GDP ...*, h. 77.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka baik yang secara langsung diambil dari hasil penelitian maupun dari data yang diolah dengan menggunakan analisis statistik.¹¹⁰ Jenis penelitian tersebut sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data berupa angka-angka yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun penelitian asosiatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau pengetahuan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan bermasalah yang diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data *time series*. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 12

tersebut.¹¹¹ Adapun data *time series* atau data deret waktu adalah data yang dicatat atau dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu, misalnya data konsumsi, ekspor, investasi, indeks harga saham, jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, jumlah pengangguran, dan data lainnya yang dicatat dari waktu ke waktu (tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, mingguan, harian, dan seterusnya).¹¹²

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data triwulan PDB, inflasi, *BI Rate*, nilai tukar rupiah, dan NPF BPRS periode 2008 sampai 2018. Data tersebut bersumber dari website Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Perdagangan RI. Selain itu, data lainnya diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang mendukung penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat dalam Statistik Perbankan Syariah. Adapun jumlah BUS, UUS, dan BPRS per Desember 2018 adalah :

¹¹¹ Boediono, Wayan Koster, *Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas Sederhana, Lugas, dan Mudah Dimengerti* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 7.

¹¹² Bambang Juanda, Junaidi, *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi* (Bogor: IPB Press, 2013), h. 1-2.

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80.

1. 14 Bank Umum Syariah
2. 20 Unit Usaha Syariah
3. 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹¹⁴ Sampel yang diambil dari populasi harus bersifat representatif (mewakili). Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.¹¹⁵ Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel, yaitu :

1. BPRS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Memiliki laporan NPF tahun 2008 sampai dengan 2018, dimana laporan tersebut tersedia di Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan karakteristik tersebut, diambil data NPF per triwulan BPRS tahun 2008 sampai dengan 2018 yang tersedia di Statistik Perbankan Syariah sehingga diperoleh data sebanyak 44 data.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹¹⁶ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan studi pustaka.

¹¹⁴ *Ibid.*, h.81.

¹¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 88.

¹¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

1. Dokumetasi

Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website*, dan lain-lain.

2. Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber data sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).¹¹⁷ Dalam hal ini variabel independen terdiri dari Produk Domestik Bruto (X_1), Inflasi (X_2), *BI Rate* (X_3), dan Nilai Tukar Rupiah (X_4).

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 39.

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.¹¹⁸ Dalam hal ini yang menjadi variabel dependen adalah Pembiayaan Bermasalah (Y).

Tabel 2.1
Definisi Operasional Variabel

| | Variabel | Definisi | Indikator | Skala Pengukuran Variabel |
|--|---------------------------|--|---|---------------------------|
| | PDB (X1) | Nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu | $PDB = \text{Konsumsi (C)} + \text{Investasi (I)} + \text{Government Spending (G)} (X (\text{Expor}) - M (\text{Impor}))$ | Nominal (Rp) |
| | Inflasi (X2) | Gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan | $I_n = \frac{(IHK_n) - (IHK_{n-1})}{IHK_{n-1}}$ | Rasio (%) |
| | <i>BI Rate</i> (X3) | Suku bunga adalah kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada public | Suku bunga Bank Indonesia | Rasio (%) |
| | Nilai tukar rupiah (X4) | Catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing | Nilai tukar rupiah terhadap USD | Nominal (Rp) |
| | Pembiayaan bermasalah (Y) | Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau | $NPF = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$ | Rasio (%) |

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 39.

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah | | |
|--|--|---|--|--|

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS di Indonesia. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang perhitungannya menggunakan EViews. Regresi dilakukan terhadap lima variabel, yaitu satu variabel dependen dan empat variabel independen.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Secara singkat statistik dapat diartikan sebagai cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan (analisis), penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu.¹¹⁹ Adapun statistik deskriptif adalah pengolahan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Dalam pengujian deskriptif terdapat pengujian nilai mean, median, modul, kuartil, varians, standar deviasi, dan berbagai macam bentuk diagram.¹²⁰

Statistik deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan yang diperoleh (meringkas dan

¹¹⁹ Bambang Soepeno, *Statistik Terapan dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial & Pendidikan* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002), h. 2.

¹²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Statistik untuk Bisnis ...*, h. 19.

menyajikan), serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna dan lebih mudah dipahami. Penyajian data pada statistik deskriptif biasanya dilakukan dengan membuat tabulasi penyajian dalam bentuk grafik, diagram, atau dengan menyajikan karakteristik-karakteristik dari ukuran pemusatan dan keragamannya.¹²¹

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS).¹²² Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolonieritas, heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.¹²³

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Namun untuk memberikan kepastian bahwa data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas. Karena belum tentu data

¹²¹ Dergibson Siagian, Sugiarto, *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.4-5.

¹²² Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 103.

¹²³ *Ibid.*, h. 45.

yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal, untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan di antaranya *Chi-Square*, *Kolmogorov Smirnov*, *Lilliefors*, *Shapiro Wilk*, *Jarque Bera*.¹²⁴

Data terdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan profitabilitas.

- 1) Jika nilai profitabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- 2) Jika nilai profitabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas (metode parsial antarvariabel). *Rule of thumb* dari metode ini adalah jika koefisien korelasi cukup tinggi yaitu lebih dari 0,85, maka model tersebut mengandung unsur multikolinearitas. Sebaliknya jika koefisien korelasi rendah yaitu kurang dari 0,85, maka model tidak mengandung unsur multikolinearitas.

Selain menggunakan metode parsial antar variabel, dapat juga dengan melihat nilai *tolerance* serta nilai *Variance Inflation Factor*

¹²⁴ *Ibid.*, h. 57.

(VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 (nilai VIF di atas 10).¹²⁵

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatter plot* dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji *Glejser*, uji *Park* atau uji *White*.¹²⁶

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering

¹²⁵ *Ibid.*, h. 124-125.

¹²⁶ *Ibid.*, h. 104.

digunakan adalah dengan uji *Durbin-Watson* (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti.

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik *Durbin Watson* yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.¹²⁷

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear adalah teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Regresi linier berganda adalah analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas dengan formulasi umum:¹²⁸

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen (Pembiayaan bermasalah/NPF)

a : Konstanta

b : Konstanta regresi

X_1 : Variabel independen (Produk Domestik Bruto)

¹²⁷ *Ibid.*, h. 60.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 45.

X_2 : Variabel independen (Inflasi)

X_3 : Variabel independen (*BI Rate*)

X_4 : Variabel independen (Nilai Tukar Rupiah)

e : Variabel error, dengan asumsi $e = 0$

Asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis regresi adalah:¹²⁹

- a. Residual menyebar normal (asumsi normalitas)
- b. Antara residual saling bebas (autokorelasi)
- c. Kehomogenan ragam residual (asumsi heteroskedastisitas)
- d. Antar variabel independen tidak berkorelasi (multikolinearitas)

4. Uji Hipotesis

- a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai $F_{hitung} \geq$ nilai F_{tabel} , maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat.¹³⁰

- b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung}

¹²⁹ *Ibid.*, h. 46.

¹³⁰ *Ibid.*, h. 87.

masing-masing variabel bebas dengan nilai t_{tabel} dengan derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat.¹³¹

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji R^2 berfungsi untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini terletak antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Sebuah garis regresi akan baik jika nilai R^2 tinggi dan sebaliknya bilai nilai R^2 rendah, maka mempunyai garis regresi yang kurang baik. Dalam regresi runtut waktu (*time series*) sering kali mendapatkan nilai R^2 yang tinggi. Hal ini terjadi hanya karena setiap variabel yang berkembang dalam runtut waktu mampu menjelaskan dengan baik variasi variabel lain yang juga berkembang dalam waktu yang sama.¹³²

¹³¹ *Ibid.*, h. 8.

¹³² *Ibid.*, h. 14-15.

BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat Objek Penelitian

a. Sejarah BPRS

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berawal sejak zaman penjajahan Belanda. Di Indonesia, BPR dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR) dan Lumbung Desa yang dibangun dengan tujuan membantu petani, pegawai, dan buruh agar dapat terlepas dari jeratan para rentenir yang membebani dengan bunga yang tinggi. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini, BPR dikenal oleh masyarakat dengan istilah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Pada tahun 1929, berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan yaitu Badan Kredit Desa (BKD) yang berdiri di Jawa dan Bali. Sementara untuk melakukan pengawasan pembiayaan, pemerintah kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat (IKP).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mendirikan bank-bank pasar yang sangat terkenal terutama karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat

(BPR). Pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah menetapkan kebijakan diregulasi perbankan yang dikenal sebagai Pakto 88. Sebagai kelanjutan dari Pakto 88, pemerintah mengeluarkan beberapa paket perbankan yang merupakan penyempurnaan dari paket sebelumnya

Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, antara lain Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil, dan lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan.

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992. Akan tetapi, jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja. Oleh karena itu, peran BPRS sangat diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah tertentu.

Sebagai langkah awal, ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPRS.

Ketiga BPRS tersebut yaitu:

- 1) PT BPR Dana Mardhatillah, di Kecamatan Margahayu, Bandung
- 2) PT BPR Berkah Amal Sejahtera, di Kecamatan Padalarang, Bandung
- 3) PT BPR Amanah Rabbaniyah, di Kecamatan Banjaran, Bandung

Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPRS tersebut mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan RI. Selanjutnya, dengan *technical assistance* dari Bank Bukopin cabang Bandung memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan, pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah masing-masing mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI. Bank Permbiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berkembang sangat pesat, bahkan per Desember 2018 BPRS berjumlah 167.

b. Kegiatan BPRS

Berbeda dengan BUS dan UUS, BPRS dalam melakukan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha BPRS meliputi:¹³³

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

¹³³ “Kegiatan BPRS” (On-line), tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>,

- a) simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - b) investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
- a) pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*
 - b) pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
 - c) pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
 - d) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
 - e) pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hawalah*
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah

- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan)

2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah pengolahan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Dalam pengujian deskriptif terdapat pengujian nilai mean, median, modul, kuartil, varians, standar deviasi, dan berbagai macam bentuk diagram. Pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan pada data variabel independen yakni Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah, serta data variabel dependen yaitu pembiayaan bermasalah (NPF). Pengujian dilakukan untuk mengetahui nilai mean, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Mean | Median | Minimum | Maksimum | Std. Deviasi |
|-------------|----|----------|-----------|----------|----------|--------------|
| PDB | 44 | 2416650 | 2409844 | 1110032 | 3841755 | 786882.6 |
| Inflasi | 44 | 5.481061 | 4.581667 | 2.586667 | 11.96333 | 2.310918 |
| BI Rate | 44 | 6.535909 | 6.540000 | 4,250000 | 9.420000 | 1.242650 |
| Nilai Tukar | 44 | 11275.10 | 11.670.33 | 8562.667 | 14684.33 | 2067.807 |
| NPF | 44 | 8.430000 | 8.015000 | 6.450000 | 11.72000 | 1.520665 |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah data atau N yang digunakan dalam penelitian ini adalah 44

pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Angka NPF (*Non Performing Financing*) sebagai variabel dependen yang menunjukkan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan biasanya disajikan dalam persentase memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 8,430000%, nilai tengah (median) sebesar 8,015000%, nilai terkecil (minimum) sebesar 6,450000%, nilai terbesar (maksimum) sebesar 11,720000%, serta standar deviasi sebesar 1,520665%. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi ($8,430000\% > 1,520665\%$), hal tersebut menunjukkan bahwa penyebaran data dinilai baik.

Variabel Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel independen mempunyai nilai mean sebesar Rp 2.416.650 milyar, nilai median sebesar Rp 2.409.844 milyar, nilai minimum sebesar Rp 1.110.032 milyar, nilai maksimum sebesar Rp 3.841.755 milyar, dan nilai standar deviasi sebesar Rp 786.882,6 milyar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya PDB per triwulan 2008 sampai dengan 2018 berkisar antara Rp 1.110.032 milyar hingga Rp 3.841.755 milyar. Adapun nilai mean lebih besar dari standar deviasi ($\text{Rp } 2.416.650 \text{ milyar} > \text{Rp } 786.882,6 \text{ milyar}$), ini berarti penyebaran data dinilai baik.

Berdasarkan tabel 4.1, variabel inflasi sebagai variabel independen mempunyai nilai mean sebesar 5,481061%, median sebesar 4,581667%, nilai minimum sebesar 2,586667%, nilai maksimum sebesar 11,96333%, dan standar deviasi sebesar 2,310918. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya inflasi per triwulan 2008 sampai dengan 2018 berkisar antara

2,586667% hingga 11,96333%. Adapun nilai mean lebih besar dari standar deviasi ($5,481061\% > 2,310918\%$), ini berarti penyebaran data dinilai baik.

Variabel *BI Rate* mempunyai nilai mean sebesar 6,535909%, median sebesar 6,540000%, nilai minimum sebesar 4,250000%, nilai maksimum sebesar 9,420000%, dan standar deviasi sebesar 1,242650%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya *BI Rate* per triwulan 2008 sampai dengan 2018 berkisar antara 4,250000% hingga 9,420000%. Adapun nilai mean lebih besar dari standar deviasi ($6,535909\% > 1,242650\%$), ini berarti penyebaran data dinilai baik.

Variabel nilai tukar (IDR-USD) sebagaimana hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 mempunyai nilai mean sebesar Rp 11.275,10, median sebesar Rp 11.670,33, nilai minimum sebesar Rp 8.562,667, nilai maksimum sebesar Rp 14.684,33, dan standar deviasi sebesar 2.067,807. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai tukar (IDR-USD) per triwulan 2008 sampai dengan 2018 berkisar antara Rp 8.562,667 hingga Rp 14.684,33. Adapun nilai mean nilai tukar (IDR-USD) lebih besar dari standar deviasi ($\text{Rp } 11.275,10 > \text{Rp } 2.067,807$), ini berarti penyebaran data dinilai baik.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji

normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal. Untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui dengan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, berarti data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

| Sampel | Jarque-Bera | Signifikansi | Keterangan |
|--------|-------------|--------------|------------|
| 44 | 0.121901 | 0.940870 | Normal |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan EViews 9, diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,121901 dengan signifikansi sebesar 0,940870. Dari tabel hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan data variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi antarvariabel independen (multikolinearitas). Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas pada model, peneliti menggunakan metode parsial antarvariabel independen. *Rule of thumb* dari metode ini adalah jika koefisien korelasi cukup tinggi yaitu lebih dari 0,85, maka model tersebut mengandung unsur multikolinearitas. Sebaliknya jika koefisien korelasi rendah yaitu kurang dari 0,85, maka model tidak mengandung unsur multikolinearitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

| | LN_PDB | INFLASI | BI_RATE | LN_NILAI_TUKAR |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| LN_PDB | 1.000000 | -0.510228 | -0.611846 | 0.794512 |
| INFLASI | -0.510228 | 1.000000 | 0.792021 | -0.257200 |
| BI_RATE | -0.611846 | 0.792021 | 1.000000 | -0.263010 |
| LN_NILAI_TUKAR | 0.794512 | -0.257200 | -0.263010 | 1.000000 |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.3 yang berupa tabel *Correlation Matrix*, diketahui bahwa nilai korelasi semua kombinasi antarvariabel independen yaitu PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar kurang dari 0,85. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t

dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai *Probability Chi-Square* lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

| Sampel | Prob. Chi-Square | Keterangan |
|--------|------------------|----------------------|
| 44 | 0.0014 | Terjadi Autokorelasi |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.4, diketahui bahwa nilai *Probability Chi-Square* sebesar 0,0014, dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terjadi autokorelasi. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menggunakan metode differensiasi.

Tabel 4.5
Hasil Perbaikan Uji Autokorelasi

| Sampel | Prob. Chi-Square | Keterangan |
|--------|------------------|----------------------------|
| 44 | 0.9867 | Tidak terjadi autokorelasi |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Hasil uji autokorelasi menggunakan metode differensiasi pada tabel di atas, menunjukkan nilai *Probability Chi-Square* sebesar 0,9867. Setelah dilakukan perbaikan uji autokorelasi menggunakan metode differensiasi, nilai *Probability Chi-Square* lebih dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah heteroskedastitas dapat menggunakan Uji *Glejser (Glejser Test)*, dengan ketentuan apabila nilai signifikansi lebih dari $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| | |
|--------------------------|--------|
| Heteroskedasticity Test: | |
| Prob. Chi-Square(14) | 0.4481 |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.6, diketahui bahwa nilai *Probability Chi-Square* sebesar 0,4481, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara dua variabel independen (bebas) atau lebih terhadap satu variabel dependen (terikat). Metode

analisis regresi berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia.

Tabel 4.7
Hail Uji Regresi Linear Berganda

| Variabel | Prediksi | Koefisien | t _{hitung} | Signifikansi | Kesimpulan |
|----------------------------------|----------|-----------|---------------------|--------------|------------|
| (Constant) | | -50.53509 | -9.1325 | 0.0000 | |
| LnPDB | - | -1.276730 | -2.0728 | 0.0449 | Diterima |
| Inflasi | + | 0.016430 | 0.2438 | 0.8086 | Ditolak |
| BIRate | + | -0.400462 | -2.7208 | 0.0096 | Ditolak |
| LnNilaiTukar | + | 8.609667 | 9.0276 | 0.0000 | Diterima |
| R-Squared = 0.8488 | | | | | |
| Adjusted R ² = 0.8333 | | | | | |
| F _{hitung} = 54.7188 | | | | | |
| Signifikansi = 0.0000 | | | | | |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 yang merupakan hasil uji regresi linear berganda terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan EViews 9, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{NPF} = -50,53509 - 1,276730 \text{ LnPDB} + 0,016430 \text{ Inflasi} - 0,400462 \text{ BIRate} + 8,626630 \text{ LnNilaiTukar}$$

Berdasarkan nilai persamaan regresi di atas, menunjukkan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar -50,53509 menyatakan bahwa ketika variabel-variabel independen (PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah) dianggap konstan atau bernilai nol, maka rata-rata pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar - 50,53509%.

- b. Koefisien regresi PDB sebesar 1,276730, berarti bahwa setiap nilai PDB mengalami kenaikan sebesar 1% maka secara rata-rata nilai NPF akan turun sebesar 1,276730%.
- c. Koefisien regresi inflasi sebesar 0,016430, berarti bahwa setiap nilai inflasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka secara rata-rata nilai NPF akan naik sebesar 0,016430%.
- d. Koefisien regresi *BI Rate* sebesar 0,400462, berarti bahwa setiap nilai *BI Rate* mengalami kenaikan sebesar 1% maka secara rata-rata nilai NPF akan turun sebesar 0,400462%.
- e. Koefisien regresi nilai tukar sebesar 8.609667, berarti bahwa setiap nilai tukar mengalami kenaikan (nilai tukar semakin melemah) sebesar 1% maka secara rata-rata nilai NPF akan naik sebesar 8.609667%.

5. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen apakah bermakna atau tidak. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4.7. Adapun pengambilan kesimpulan dari hasil uji dilakukan dengan ketentuan jika tingkat signifikansi kurang dari 5% (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika tingkat signifikansi lebih dari 5% (0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

1) Pengaruh PDB terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) BPRS

Berdasarkan hasil uji t pengaruh PDB terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) yang dapat dilihat pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,0726 dan nilai signifikansi sebesar 0,0449 (kurang dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

2) Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) BPRS

Berdasarkan hasil uji t pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) yang dapat dilihat pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,2438 dan nilai signifikansi sebesar 0,8086 (kurang dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF.

3) Pengaruh *BI Rate* terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) BPRS

Berdasarkan hasil uji t pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) yang dapat dilihat pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,7208 dan nilai signifikansi sebesar 0,0097 (kurang dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

4) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) BPRS

Berdasarkan hasil uji t pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) yang dapat dilihat pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,0276 dan nilai signifikansi sebesar

0,0000 (kurang dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji yang dapat dilihat pada tabel 4.7, diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 54,7188 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 kurang dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS di Indonesia.

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini terletak antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Sebuah garis regresi akan baik jika nilai R^2 tinggi dan sebaliknya bilai nilai R^2 rendah maka mempunyai garis regresi yang kurang baik.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.7, diketahui nilai *Adjusted R^2* sebesar 0,8333. Hal ini berarti 83,33% variabel dependen yaitu pembiayaan bermasalah yang diukur dengan rasio NPF dapat dijelaskan oleh empat variabel independen yaitu PDB,

inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar. Sedangkan sisanya ($100\% - 83,33\% = 12,67\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model regresi.

B. Analisis Data

1. Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah secara Parsial terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia

a. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia

Produk Domestik Bruto (PDB) dalam bahasa Inggrisnya *Gross Domestic Product* (GDP) diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. PDB mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi disuatu wilayah negara (domestik) tanpa membedakan kepemilikan/kewarganegaraan pada suatu periode tertentu. Dari hasil pengujian secara parsial (uji t) menggunakan program EViews 9, dapat disimpulkan bahwa PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) BPRS. Kesimpulan tersebut sesuai dengan hasil analisis regresi berganda yang dapat dilihat pada tabel 4.1, dimana dari hasil analisis tersebut diperoleh nilai t_{hitung} PDB sebesar -2,0728 dan nilai signifikansi sebesar 0,0449 (kurang dari $\alpha = 0,05$). Adapun hipotesis yang diajukan yaitu PDB berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Apabila PDB mengalami peningkatan, maka pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan dengan nilai NPF akan menurun. Hal tersebut disebabkan apabila PDB mengalami peningkatan itu membuktikan bahwa tingkat total pendapatan masyarakat semakin tinggi. Jika pendapatan masyarakat tinggi, maka masyarakat akan mampu mengembalikan pinjaman kepada bank. Dengan demikian, tingkat pembiayaan bermasalah akan berkurang.

Tahun 2017 triwulan I hingga triwulan III nilai PDB Indonesia selalu mengalami kenaikan. Pada triwulan I nilai PDB adalah sebesar Rp 3.227.762,10 milyar, triwulan II sebesar Rp 3.366.096,20 milyar, dan triwulan III sebesar Rp 3.503.438,90 milyar. Kenaikan PDB tersebut diikuti oleh kenaikan NPF BPRS. Adapun tingkat NPF BPRS tahun 2018 triwulan I sebesar 9,84%, triwulan II sebesar 10,50%, dan triwulan III sebesar 10,78%. Pada triwulan IV tahun 2017, nilai PDB mengalami penurunan menjadi Rp 3.489.915,40 milyar. Penurunan nilai PDB tersebut diikuti dengan penurunan NPF sebesar 0,32% yang semula 10,78% menjadi 10,46%. Tahun 2018 triwulan I nilai PDB kembali meningkat hingga hingga triwulan III dan mengalami penurunan pada triwulan IV. Kenaikan dan penurunan nilai PDB

tersebut juga diikuti dengan kenaikan dan penurunan nilai NPF BPRS. Adapun nilai PDB tahun 2018 triwulan I sebesar Rp 3.511.653 milyar, pada triwulan II sebesar Rp 3.685.273,40 milyar, triwulan III sebesar Rp 3.841.755,20 milyar, dan triwulan IV sebesar Rp 3.798.675,20 milyar. Sedangkan nilai NPF tahun 2018 triwulan I sebesar 10,93%, triwulan II sebesar 11,63%, triwulan III sebesar 11,72%, dan triwulan IV sebesar 10,53%. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa PDB dan NPF memiliki hubungan yang bersifat positif. Ketika nilai PDB naik maka nilai NPF juga naik, sebaliknya ketika nilai PDB turun maka nilai NPF juga turun.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristiani Naibaho dan Sri Mangesti (2018). Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL.

b. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Terdapat tiga syarat untuk dapat dikatakan terjadi inflasi, yaitu adanya kenaikan harga, kenaikan terjadi terhadap harga-harga barang secara umum, dan kenaikan harga tersebut berlangsung cukup lama. Dari hasil uji t menggunakan EViews 9, dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Kesimpulan tersebut

dibuktikan dengan hasil analisis pada tabel 4.7, dimana dari hasil analisis diperoleh nilai t_{hitung} inflasi sebesar 0,2438 dan nilai signifikan sebesar 0,8086 (lebih dari $\alpha = 0,05$). Adapun hipotesis yang diajukan yaitu inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 dimana diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,8086 > 0,05$ berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, apabila nilai inflasi mengalami peningkatan atau penurunan hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal tersebut dikarenakan bank syariah memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap perubahan tingkat inflasi dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam melakukan pembiayaan bank syariah menggunakan beberapa macam akad baik akad dengan pola titipan, bagi hasil, jual beli, atau sewa. Penentuan penggunaan bermacam-macam akad tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah peminjam, hal ini dilakukan salah satunya dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Pembiayaan yang paling mendominasi digunakan dalam bank syariah adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*, yaitu sebesar 55% berdasarkan Statistik Perbankan Syariah 2018.

Berdasarkan penelitian Mutaminah dan Chasanah (2012), menyatakan bahwa dalam aplikasi *murabahah* angsuran bersifat *fixed* (tetap) dari awal hingga akhir waktu pengembalian pembiayaan. Sehingga saat terjadi kenaikan atau penurunan inflasi dalam jangka panjang, hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah kepada bank syariah karena nasabah dapat merencanakan pengaturan *cash flow* yang dibutuhkan untuk melunasi pembiayaannya. Dengan demikian, dampak dari inflasi dapat dikurangi dan tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bermasalah (NPF).¹³⁴

Tahun 2017 triwulan I nilai inflasi sebesar 3,64% dan nilai NPF BPRS sebesar 9,84%. Pada triwulan II inflasi meningkat menjadi 10,50%, nilai NPF juga meningkat menjadi 10,50%. Pada triwulan III hingga triwulan IV tingkat inflasi mengalami penurunan (3,81%, 3,50%). Akan tetapi tidak demikian dengan nilai NPF. Pada triwulan III nilai NPF mengalami kenaikan sebesar 0,28% menjadi 10,78%, dan pada triwulan IV nilai NPF mengalami penurunan sebesar 0,32% menjadi 10,46%. Pada tahun 2018 triwulan I, II, dan III nilai inflasi selalu turun (3,28%, 3,25%, 3,09%) dan naik kembali pada triwulan IV (3,17%). Adapun nilai NPF tahun 2018 triwulan I sebesar 10,93%, triwulan II naik menjadi 11,63%, triwulan III juga naik menjadi

¹³⁴ Syauzi Bisya, "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya *Non Performing Financing* Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2018", (Tesis: Magister Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 92.

11,72%, dan pada triwulan IV nilai NPF turun menjadi 10,53%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap NPF. Kenaikan inflasi tidak selalu diikuti dengan kenaikan NPF, demikian juga dengan penurunan inflasi tidak selalu diikuti dengan penurunan NPF.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syauzi Bisyrara (2018). Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF Bank Syariah di Indonesia.

c. Pengaruh *BI Rate* Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.¹³⁵ Suku bunga (*BI Rate*) merupakan faktor yang utama dalam aktifitas bank, baik suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan. Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi. Dari hasil analisis yang dilakukan menggunakan EViews 9, dapat disimpulkan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai t_{hitung} *BI Rate* sebesar -2,7208 dan

¹³⁵ Kristiani Naibaho dan Sri Mangesti Rahayu, *Pengaruh GDP ...*, h. 91.

nilai signifikan sebesar 0,0097 (kurang dari $\alpha = 0,05$). Adapun hipotesis yang diajukan yaitu *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Artinya apabila *BI Rate* mengalami kenaikan, maka tingkat pembiayaan bermasalah pada BPRS akan menurun. Hal ini dikarenakan meskipun suku bunga digunakan dalam kegiatan operasional bank konvensional, namun bank syariah tidak dapat lepas dari pengaruh penetapan suku bunga. Apabila *BI Rate* naik, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan bertambah karena jumlah kewajiban yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank syariah lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Akan tetapi, dengan jumlah pengembalian pinjaman yang lebih rendah tersebut, maka nasabah kemungkinan besar dapat melunasi kewajibannya kepada bank syariah.

Tahun 2016 triwulan I, II, III, dan IV nilai *BI Rate* selalu mengalami penurunan (7,00%, 6,67%, 5,58%, 4,75%). Berbanding terbalik dengan *BI Rate*, nilai NPF BPRS tahun 2016 triwulan I, II, dan III selalu mengalami kenaikan meskipun pada triwulan IV mengalami penurunan (9,31%, 9,43%, 10,48%, 9,75%). Pada tahun 2017 triwulan I dan II nilai *BI Rate* tetap yaitu sebesar 4,75%, dan pada triwulan III

turun menjadi 4,50%. Sedangkan nilai NPF selalu mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 triwulan IV sebesar 9,75%, pada tahun 2017 triwulan I naik menjadi 9,84%, triwulan II menjadi 10,50%, triwulan III menjadi 10,78%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa *BI Rate* memiliki hubungan yang bersifat negatif terhadap NPF BPRS. Ketika *BI Rate* menurun maka nilai NPF mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Annisa Kurniasih Fauziyah (2015) yang menyimpulkan bahwa *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

d. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia

Exchange Rates (nilai tukar uang) atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*) atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Berdasarkan hasil uji t menggunakan EViews 9, disimpulkan bahwa nilai tukar (IDR/USD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Kesimpulan yang diambil sesuai dengan hasil analisis pada tabel 4.7, dimana dari hasil analisis tersebut diperoleh nilai t_{hitung} nilai tukar (IDB/USD) sebesar 9,0276 dan nilai signikansi sebesar 0,0000 (kurang dari $\alpha = 0,05$). Adapun hipotesis yang diajukan adalah nilai tukar

rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Artinya, apabila nilai tukar rupiah mengalami kenaikan (nilai tukar melemah), maka pembiayaan bermasalah juga akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar terutama ketika terjadi depresiasi akan meningkatkan biaya produksi dan pembiayaan impor yang pada akhirnya akan berakibat pada penurunan pendapatan perusahaan terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor-impor dan bahan bakunya diperoleh dari luar negeri. Akibat menurunnya pendapatan perusahaan, perusahaan akan kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank. Di sisi lain, pengelolaan dana bank syariah dalam bentuk penyaluran dana melalui pembiayaan cenderung menghindari risiko yang berhubungan dengan valuta asing, akan tetapi dalam kegiatan operasional bank syariah yang berhubungan langsung dengan risiko fluktuasi nilai tukar misal pada aktivitas *treasury* yakni pemenuhan kebutuhan likuiditas bank menjadi dapat terhindarkan.

Tahun 2017 triwulan II hingga tahun 2018 triwulan III nilai tukar (IDR terhadap USD) selalu mengalami kenaikan, nilai NPF juga selalu mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2017 triwulan IV mengalami penurunan dan pada tahun 2018 triwulan I hingga III

kembali naik. Pada tahun 2018 triwulan IV nilai tukar menurun yang diikuti dengan penurunan NPF. Adapun nilai tukar tahun 2017 triwulan II hingga tahun 2018 triwulan IV adalah Rp13.322,33, Rp13.388,67, Rp13.544,67, Rp13.625,33, Rp14.077,33, Rp14.684,33, dan 14.682,33. Sementara nilai NPF tahun 2017 triwulan II hingga tahun 2018 triwulan IV adalah 10,50%, 10,78%, 10,46%, 10,93%, 11,63%, 11,72%, dan 10,53%. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tersebut, menunjukkan bahwa nilai tukar (IDR terhadap USD) memiliki hubungan yang bersifat positif. Dimana ketika nilai tukar naik maka NPF juga naik, dan jika nilai tukar turun maka NPF juga turun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Amir Hamzah (2018) yang menyimpulkan bahwa nilai tukar (kurs) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

2. Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah secara Simultan Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia

Produk Domestik Bruto, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah merupakan indikator ekonomi makro. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan EViews 9, disimpulkan bahwa PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan

hasil pengujian secara simultan (uji F) yang menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 54,71883 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000 dimana nilai tersebut kurang dari $\alpha = 0,05$ ($0,0000 < 0,05$).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar rupiah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Ini berarti apabila perekonomian meningkat, maka tingkat pembiayaan bermasalah akan membaik (berkurangnya jumlah pembiayaan bermasalah). Sebagai lembaga intermediasi semakin baik tingkat intermedia suatu perbankan yang tercermin dari pengumpulan dan penyaluran dananya dari dan untuk masyarakat, maka perkembangan ekonomi juga akan semakin berkembang dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila perekonomian semakin baik maka hal tersebut akan dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah. Karena dengan perekonomian yang baik, maka masyarakat akan mampu untuk membayar kewajibannya kepada bank syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kristiani Naibaho dan Sri Mangesti (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *Gross Domestic Product*, inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Non Performing Loan*.

3. Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang mengatur semua perkara hidup manusia. Islam hadir sebagai solusi atau pemecah masalah atas berbagai masalah hidup manusia. Islam telah melahirkan seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya menyangkut persoalan-persoalan ibadah dan keimanan, hubungan manusia dengan sesamanya menyangkut masalah muamalah termasuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri menyangkut persoalan makanan, minuman, pakaian, dan akhlak.¹³⁶

Sistem ekonomi dalam pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi (penyaluran).¹³⁷ Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam dan merupakan lembaga intermediasi memiliki tiga tugas utama, salah satunya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan dalam bank syariah adalah penyediaan dana oleh bank syariah kepada nasabah melalui transaksi bagi hasil, jual beli, pinjam meminjam, atau sewa-menyewa jasa dimana setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh*.

¹³⁶ Rahmat Sunnara, *Islam dan Ekonomi*, (Jakarta Selatan: Buana Cipta Pustaka, 2009), h.

1.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 3.

Hubungan antara pemberi pembiayaan dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan penerima pembiayaan yaitu nasabah, merupakan kerja sama yang saling menguntungkan yang dapat diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Ma'idah ayat 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (سورة المائدة : ٥ : ٢)

Artinya: ...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*¹³⁸

Setiap pemberian pembiayaan oleh bank syariah termasuk BPRS kepada nasabah terdapat kemungkinan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut antara lain kegagalan bisnis, karakter dari nasabah yang tidak mempunyai i'tikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan pembiayaan. Dengan demikian, antisipasi pembiayaan bermasalah sangat diperlukan bagi bank syariah. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi bank syariah dari setiap kemungkinan yang merugikan.

Peraturan tentang manajemen risiko telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/25/PBI/2011 mengenai risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut selain berlaku

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 106.

bagi BUS dan UUS juga berlaku bagi BPRS. Pentingnya manajemen risiko pada hal ini mengantisipasi pembiayaan bermasalah dalam bank syariah juga telah di terangkan dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ (سورة الحشر : ٥٩ : ١٨)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹³⁹

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan sebelum memulai usaha agar lebih baik dimasa yang akan datang. Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 tersebut merupakan asas dalam mengintrospeksi diri dan sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya, demikian juga dengan manajemen risiko. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang terlalu parah, maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung upaya-upaya untuk meminimalisir risiko sekaligus mempercayai bahwa hanya Allah SWT. yang menentukan hasilnya.

Penyelamatan pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam rangka mengatasi permasalahan pembiayaan

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 548.

yang dihadapi oleh nasabah peminjam yang memiliki prospek usaha yang baik namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya. Cara melakukan penyelamatan pembiayaan adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar nasabah dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Di dalam PBI tersebut disebutkan, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS disebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. *Reschedulling* dilakukan berdasarkan aturan Islam yang tertera dalam Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan bagi nasabah yang tidak bisa

menyelaskan ataupun melunasi pembiayaannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati yang disebabkan oleh nasabah dalam keadaan tidak baik, seperti usaha nasabah yang merupakan sumber pendapatannya sehari-hari mengalami keterpurukan, akan tetapi nasabah dengan jenis ini mempunyai niat atau *i'tikad* yang baik untuk melunasi pembiayaannya dan nasabah meminta keringanan dalam pembayaran. Penjadwalan kembali dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴⁰

b. Persyaratan kembali (*revonditioning*)

Persyaratan kembali (*revonditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan kembali yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* atau Persyaratan Kembali. Beberapa ketentuan pemberian potongan atau persyaratan kembali, yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan potongan kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilan dengan tepat waktu

¹⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*

dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, besar potongan diserahkan pada kebijakan LKS, dan pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.¹⁴¹

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali dilakukan LKS sesuai dengan Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- 1) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
- 2) konversi akad pembiayaan;
- 3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan
- 4) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Semua jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dilakukan restrukturisasi. Namun mengingat dalam bank syariah terdapat bermacam-macam jenis pembiayaan dengan karakteristik yang berbeda antara satu akad dengan akad lainnya, maka dalam proses restrukturisasi tidak bisa disamakan untuk semua jenis pembiayaan, melainkan harus tetap memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan atau akad tersebut. Tata cara restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diberikan didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia

¹⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagiah Murabahah

No. 10/34/DPbS Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan salah satunya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ (سورة البقرة : ٢ : ٢٨٠)

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*¹⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila pihak yang berhutang memiliki kendala dalam melunasi hutangnya, maka pihak yang memberikan hutang dianjurkan untuk memberikan keringanan berupa kelapangan waktu hingga pihak yang berhutang tersebut bisa membayar hutangnya. Apabila pemberi hutang (bank syariah) menghapuskan semua pokok dari tanggungan si pemilik hutang (nasabah) atau memberikan hutang tersebut dengan menyedahkan sebagian atau semuanya, maka hal tersebut menjadi amalan yang lebih baik. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) untuk membayar kewajibannya terhadap bank syariah termasuk BPRS.

¹⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Uji t menunjukkan bahwa secara parsial:
 - a. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai t_{hitung} PDB sebesar -2,0728 dan nilai signifikansi sebesar $0,0432 < 0,05$.
 - b. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai t_{hitung} inflasi sebesar 0,2438 dan nilai signifikansi sebesar $0,8199 > 0,05$.
 - c. *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai t_{hitung} *BI Rate* sebesar -2,7208 dan nilai signifikansi sebesar $0,0096 < 0,05$.
 - d. Nilai Tukar (IDR/USD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai t_{hitung} nilai tukar (IDR/USD) sebesar 9,0276 dan nilai signifikansi sebesar $0,0000 > 0,05$.

2. Hasil uji F menunjukkan bahwa Produk Domestik Produk, Inflasi, *BI Rate*, dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai F_{hitung} sebesar 54,7352 dan nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$.
3. Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan sebelum memulai usaha agar berjalan lebih baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian, manajemen risiko pembiayaan sangat penting bagi bank syariah untuk mendukung upaya-upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Pemberian pembiayaan dalam ekonomi Islam didasarkan pada asas tolong-menolong dan toleransi oleh pihak bank syariah dalam hal ini BPRS terhadap nasabah yang tidak mampu membayar angsuran atau melunasi kewajibannya pada bank. Sebagai landasan hukum tentang pembiayaan bermasalah antara lain telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS, Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005, Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005, dan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005.

B. Saran

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), hendaknya bank lebih mewaspadai tingkat perkembangan ekonomi yang tidak pasti. Bank juga harus lebih teliti dalam menganalisis permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan melihat prospek perekonomian dimasa yang akan datang,

apakah kondisi ekonomi akan lebih baik atau sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah, bank sebaiknya selalu melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan nasabah yang diberi pembiayaan, apakah usaha berjalan lancar atau tidak.

2. Bagi nasabah penerima pembiayaan, jika ingin mengajukan pembiayaan kepada bank maka calon nasabah harus benar-benar mengetahui kemampuannya dalam manajemen bisnis. Selain itu, nasabah sangat dianjurkan untuk memilih skim pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis yang akan dijalkannya. Hal tersebut sangat diperlukan demi kelancaran bisnis yang akan mempengaruhi nasabah dalam membayar angsuran kepada bank agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
3. Bagi akademisi, dalam penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen dari penelitian ini tidak hanya indikator ekonomi makro, tetapi juga variabel lain yang dianggap dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah. Dengan demikian, diharapkan akan didapat hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia. 2010)
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Teori Makroekonomi Islam* (Jakarta: Alfabeta. 2010)
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2000)
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015)
- Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016)
- Boediono dan Wayan Koster. *Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas Sederhana. Lugas. dan Mudah Dimengerti* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2002)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009)
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-empat*. (Jakarta: Gramedia. 2011)
- Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2016)
- Herlambang, Tedy et. Al. *Ekonomi Makro Teori. Analisis. dan Kebijakan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001)
- Ikhsan, Nurul. *Perbankan Syariah* (Ciputat: GP Press Group. 2014)
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana. 2010)
- Juanda, Bambang dan Junaidi. *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi* (Bogor: IPB Press. 2013)
- Karim, Adiwarmarman A. *BANK ISLAM Analisis Fikih dan Keuangan*. Depok : Kharisma Putra Utama Offset. 2013
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014)
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012)
- Kasmir. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2012)

- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016)
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah. 2015)
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2011)
- Nurlaili. *Analisis Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2011-2013*. (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2014)
- P., Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013)
- Riyadi, Selamat. *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006)
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto. *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002)
- Soepeno, Bambang. *Statistik Terapan dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial & Pendidikan* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 2002)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2013)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2017)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2011)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2017)
- Sujarweni, V. Wiratna. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015)
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016)
- Sunnara, Rahmat. *Islam dan Ekonomi*. (Jakarta Selatan: Buana Cipta Pustaka. 2009)
- Syahbudi, Muhammad. *Buku Diktat Ekonomi Makro Perspektif Islam* (Medan : FEBI UIN Sumatera Utara. 2018)
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2013)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 1

Vaithzal, Rivai. Buchari Andi. *Islamic Economics*. (Jakarta: PT Bumi Perkasa. 2009)

Jurnal

Akbar, Dinnul Alfian. "Inflasi. Gross Domestic Product (GDP). Capital Adequacy Ratio (CAR). dan Finance to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia". (Jurnal I-Economic Vol.2 No.2. 2016)

Asngari, Imam. "Pengaruh Kondisi Ekonomi Makro dan Karakteristik Bank Terhadap Efisiensi Industri Perbankan Syariah di Indonesia". (Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.1. No.2. 2013)

Bisyara, Syauzi. "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya *Non Performing Financing Bank* Syariah di Indonesia Periode 2014-2018". (Tesis: Magister Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2018)

Firmansari, Daisy. Noven Suprayogi. "Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Spesifik Bank Terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Period 2003-2014". (JESTT Vol.2 No.6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Airlangga. 2015)

Hamzah, Amir. "Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017)". (Journal of Islamic Finance and Accounting. Vol. 1 No.2. Universitas Kuningan. 2018)

Mutaminah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia". (Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 19. No.12. 2012)

Naibaho, Kristiani dan Sri Mangesti Rahayu. "Pengaruh GDP. Inflasi. BI Rate. Nilai Tukar Terhadap Non Performing Loan Bank Umum Konvensional di Indonesia (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)". (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 62 No. 2. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sriwijaya. 2018)

Wijoyo, Satrio. "Analisis Faktor Makroekonomi dan Kondisi Spesifik Bank Syariah terhadap Non Performing Finance (Studi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Ada di Indonesia Periode 2010:1-

2015:12". (Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Volume 5. Nomor 6. 2016. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta)

Website

"*BI Rate*" (On-line), tersedia di <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7-day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx> (11 Februari 2019)

"*BI Rate*" (On-line), tersedia di <http://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/22%2000:00:00/1061/bi-rate-2005-2018.html> (28 Mei 2019)

"Inflasi" (On-line), tersedia di <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx> (28 Mei 2019)

"Nilai Tukar Rupiah" (On-line), tersedia di <http://www.kemendag.go.id/economic-profile/economiv-indicators/exchange-rates> (28 Mei 2019)

"Kegiatan BPRS" (On-line), tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> (28 Mei 2019)

"Produk Domestik Bruto" (On-line), tersedia di <http://www.bps.go.id/subject/169/produk-domestik-bruto--pengeluaran-.html#subjekViewTab3> (1 Juni 2019)

"Statistik Perbankan Syariah 2008-2018" (On-line), tersedia di <http://www.ojk.co.id> (28 Februari 2019)



LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1 TABEL PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)
TAHUN 2008-2018**

| Tabel 1. Produk Domestik Bruto (Miliar Rupiah) | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Tahun | Triwulan | | | | Tahunan |
| | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |
| 2008 | 1.110.032,30 | 1.220.605,90 | 1.327.509,60 | 1.290.540,60 | 4.948.688,40 |
| 2009 | 1.317.409,40 | 1.383.350,60 | 1.456.421,80 | 1.446.689,40 | 5.603.871,20 |
| 2010 | 1.603.771,90 | 1.704.509,90 | 1.786.196,60 | 1.769.654,70 | 6.864.133,10 |
| 2011 | 1.834.355,10 | 1.928.233,00 | 2.053.745,40 | 2.015.392,50 | 7.831.726,00 |
| 2012 | 2.061.338,30 | 2.162.036,90 | 2.223.641,60 | 2.168.687,70 | 8.615.704,50 |
| 2013 | 2.235.288,50 | 2.342.589,50 | 2.491.158,50 | 2.477.097,50 | 9.546.134,00 |
| 2014 | 2.506.300,20 | 2.618.947,30 | 2.746.762,40 | 2.697.695,40 | 10.569.705,30 |
| 2015 | 2.728.180,70 | 2.867.948,40 | 2.990.645,00 | 2.939.558,70 | 11.526.332,80 |
| 2016 | 2.929.269,00 | 3.073.536,70 | 3.205.019,00 | 3.193.903,80 | 12.401.728,50 |
| 2017 | 3.227.762,10 | 3.366.096,20 | 3.503.438,90 | 3.489.915,40 | 13.587.212,60 |
| 2018 | 3.511.653,70 | 3.685.273,40 | 3.841.755,20 | 3.798.675,20 | 14.837.357,50 |

Sumber: <https://www.bps.go.id/subject/169/produk-domestik-bruto--pengeluaran-.html#subjekViewTab3> (Juli 2019)



LAMPIRAN 2 TABEL INFLASI TAHUN 2008-2018

| Tahun | Tabel 2. Inflasi (%) | | | | | | | |
|-------|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | Bulanan & Triwulan | | | | | | | |
| | Jan | Feb | Mar | TW1 | Apr | Mei | Jun | TW2 |
| 2008 | 7,36 | 7,40 | 8,17 | 7,64 | 8,96 | 10,38 | 11,03 | 10,12 |
| 2009 | 9,17 | 8,60 | 7,92 | 8,56 | 7,31 | 6,04 | 3,65 | 5,67 |
| 2010 | 3,72 | 3,81 | 3,43 | 3,65 | 3,91 | 4,16 | 5,05 | 4,37 |
| 2011 | 7,02 | 6,84 | 6,65 | 6,84 | 6,16 | 5,98 | 5,54 | 5,89 |
| 2012 | 3,65 | 3,56 | 3,97 | 3,73 | 4,50 | 4,45 | 4,53 | 4,49 |
| 2013 | 4,57 | 5,31 | 5,90 | 5,26 | 5,57 | 5,47 | 5,90 | 5,65 |
| 2014 | 8,22 | 7,75 | 7,32 | 7,76 | 7,25 | 7,32 | 6,70 | 7,09 |
| 2015 | 6,96 | 6,29 | 6,38 | 6,54 | 6,79 | 7,15 | 7,26 | 7,07 |
| 2016 | 4,14 | 4,42 | 4,45 | 4,34 | 3,60 | 3,33 | 3,45 | 3,46 |
| 2017 | 3,49 | 3,83 | 3,61 | 3,64 | 4,17 | 4,33 | 4,37 | 4,29 |
| 2018 | 3,25 | 3,18 | 3,40 | 3,28 | 3,41 | 3,23 | 3,12 | 3,25 |

| Tahun | Tabel 2. Inflasi (%) | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Bulanan & Triwulan | | | | | | | |
| | Jul | Ags | Sep | TW3 | Okt | Nov | Des | TW4 |
| 2008 | 11,90 | 11,85 | 12,14 | 11,96 | 11,77 | 11,68 | 11,06 | 11,50 |
| 2009 | 2,71 | 2,75 | 2,83 | 2,76 | 2,57 | 2,41 | 2,78 | 2,59 |
| 2010 | 6,22 | 6,44 | 5,80 | 6,15 | 5,67 | 6,33 | 6,96 | 6,32 |
| 2011 | 4,61 | 4,79 | 4,61 | 4,67 | 4,42 | 4,15 | 3,79 | 4,12 |
| 2012 | 4,56 | 4,58 | 4,31 | 4,48 | 4,61 | 4,32 | 4,30 | 4,41 |
| 2013 | 8,61 | 8,79 | 8,4 | 8,60 | 8,32 | 8,37 | 8,38 | 8,36 |
| 2014 | 4,53 | 3,99 | 4,53 | 4,35 | 4,83 | 6,23 | 8,36 | 6,47 |
| 2015 | 7,26 | 7,18 | 6,83 | 7,09 | 6,25 | 4,89 | 3,35 | 4,83 |
| 2016 | 3,21 | 2,79 | 3,07 | 3,02 | 3,31 | 3,58 | 3,02 | 3,30 |
| 2017 | 3,88 | 3,82 | 3,72 | 3,81 | 3,58 | 3,30 | 3,61 | 3,50 |
| 2018 | 3,18 | 3,20 | 2,88 | 3,09 | 3,16 | 3,23 | 3,13 | 3,17 |

Sumber : <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx> (Juli 2019)

LAMPIRAN 3 TABEL BI RATE TAHUN 2008-2018

| | Tabel 3. BI Rate (%) | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tahun | Bulanan & Triwulan | | | | | | | |
| | Jan | Feb | Mar | TW1 | Apr | Mei | Jun | TW2 |
| 2008 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,25 |
| 2009 | 8,75 | 8,25 | 7,75 | 8,25 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 7,25 |
| 2010 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2011 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,67 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 2012 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 5,83 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 2013 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | 5,83 |
| 2014 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 2015 | 7,75 | 7,50 | 7,50 | 7,58 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 2016 | 7,25 | 7,00 | 6,75 | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,67 |
| 2017 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 2018 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | 5,25 | 4,75 |

| | Tabel 3. BI Rate (%) | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tahun | Bulanan & Triwulan | | | | | | | |
| | Jul | Ags | Sep | TW3 | Okt | Nov | Des | TW4 |
| 2008 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 9,50 | 9,50 | 9,25 | 9,42 |
| 2009 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6,58 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2010 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2011 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,17 |
| 2012 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 2013 | 6,50 | 7,00 | 7,25 | 6,92 | 7,25 | 7,50 | 7,50 | 7,42 |
| 2014 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,75 | 7,75 | 7,67 |
| 2015 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 2016 | 6,50 | 5,25 | 5,00 | 5,58 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 2017 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 2018 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 5,92 |

Sumber: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/22%2000:00:00/1061/bi-rate-2005-2018.html> (Juli 2019)

LAMPIRAN 4 TABEL NILAI TUKAR (IDR-USD) TAHUN 2008-2018

| Tabel 4. Nilai Tukar IDR Terhadap USD (Rupiah) | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tahun | Bulanan & Triwulan | | | | | | | |
| | Jan | Feb | Mar | TW1 | Apr | Mei | Jun | TW2 |
| 2008 | 9.291,00 | 9.230,00 | 9.217,00 | 9.246,00 | 9.234,00 | 9.318,00 | 9.225,00 | 9.259,00 |
| 2009 | 11.355,00 | 11.980,00 | 11.575,00 | 11.636,67 | 10.713,00 | 10.340,00 | 10.255,00 | 10.436,00 |
| 2010 | 9.365,00 | 9.335,00 | 9.115,00 | 9.271,67 | 9.012,00 | 9.180,00 | 9.083,00 | 9.091,67 |
| 2011 | 9.057,00 | 8.823,00 | 8.709,00 | 8.863,00 | 8.574,00 | 8.537,00 | 8.597,00 | 8.569,33 |
| 2012 | 9.000,00 | 9.085,00 | 9.180,00 | 9.088,33 | 9.190,00 | 9.565,00 | 9.480,00 | 9.411,67 |
| 2013 | 9.698,00 | 9.667,00 | 9.719,00 | 9.694,67 | 9.722,00 | 9.802,00 | 9.929,00 | 9.817,67 |
| 2014 | 12.226,00 | 11.634,00 | 11.404,00 | 11.754,67 | 11.532,00 | 11.611,00 | 11.969,00 | 11.704,00 |
| 2015 | 12.625,00 | 12.863,00 | 13.084,00 | 12.857,33 | 12.937,00 | 13.211,00 | 13.332,00 | 13.160,00 |
| 2016 | 13.846,00 | 13.395,00 | 13.276,00 | 13.505,67 | 13.204,00 | 13.615,00 | 13.180,00 | 13.333,00 |
| 2017 | 13.343,00 | 13.347,00 | 13.321,00 | 13.337,00 | 13.327,00 | 13.321,00 | 13.319,00 | 13.322,33 |
| 2018 | 13.413,00 | 13.707,00 | 13.756,00 | 13.625,33 | 13.877,00 | 13.951,00 | 14.404,00 | 14.077,33 |

| Tabel 4. Nilai Tukar IDR Terhadap USD (Rupiah) | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tahun | Bulanan & Triwulan | | | | | | | |
| | Jul | Ags | Sep | TW3 | Okt | Nov | Des | TW4 |
| 2008 | 9.118,00 | 9.153,00 | 9.378,00 | 9.216,33 | 10.995,00 | 12.151,00 | 10.950,00 | 11.365,33 |
| 2009 | 9.920,00 | 10.060,00 | 9.681,00 | 9.887,00 | 9.545,00 | 9.480,00 | 9.400,00 | 9.475,00 |
| 2010 | 8.952,00 | 9.041,00 | 8.924,00 | 8.972,33 | 8.928,00 | 9.013,00 | 8.991,00 | 8.977,33 |
| 2011 | 8.508,00 | 8.578,00 | 8.823,00 | 8.636,33 | 8.835,00 | 9.170,00 | 9.068,00 | 9.024,33 |
| 2012 | 9.485,00 | 9.560,00 | 9.588,00 | 9.544,33 | 9.615,00 | 9.605,00 | 9.670,00 | 9.630,00 |
| 2013 | 10.278,00 | 10.924,00 | 11.613,00 | 10.938,33 | 11.234,00 | 11.977,00 | 12.189,00 | 11.800,00 |
| 2014 | 11.591,00 | 11.717,00 | 12.212,00 | 11.840,00 | 12.082,00 | 12.196,00 | 12.440,00 | 12.239,33 |
| 2015 | 13.481,00 | 14.027,00 | 14.657,00 | 14.055,00 | 13.639,00 | 13.840,00 | 13.795,00 | 13.758,00 |
| 2016 | 13.094,00 | 13.300,00 | 12.998,00 | 13.130,67 | 13.051,00 | 13.563,00 | 13.436,00 | 13.350,00 |
| 2017 | 13.323,00 | 13.351,00 | 13.492,00 | 13.388,67 | 13.572,00 | 13.514,00 | 13.548,00 | 13.544,67 |
| 2018 | 14.413,00 | 14.711,00 | 14.929,00 | 14.684,33 | 15.227,00 | 14.339,00 | 14.481,00 | 14.682,33 |

Sumber: SEKI BI, diolah Kementerian Perdagangan

<https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/exchange-rates>

LAMPIRAN 5 TABEL NILAI NPF BPRS TAHUN 2008-2018

| Tahun | Tabel 5. NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (%) | | | | | | | |
|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Bulanan & Triwulan | | | | | | | |
| | Jan | Feb | Mar | TW1 | Apr | Mei | Jun | TW2 |
| 2008 | | | | 7,90% | | | | 7,51% |
| 2009 | 8,81% | 8,74% | 8,41% | 8,65% | 8,32% | 8,22% | 7,91% | 8,15% |
| 2010 | 7,36% | 7,48% | 7,37% | 7,40% | 7,19% | 7,13% | 6,92% | 7,08% |
| 2011 | 6,79% | 7,04% | 7,15% | 6,99% | 7,02% | 6,82% | 7,09% | 6,98% |
| 2012 | 6,68% | 6,61% | 6,42% | 6,57% | 6,50% | 6,47% | 6,39% | 6,45% |
| 2013 | 6,91% | 7,33% | 7,21% | 7,15% | 7,32% | 7,69% | 7,25% | 7,42% |
| 2014 | 7,77% | 7,71% | 7,74% | 7,74% | 8,00% | 8,23% | 8,18% | 8,14% |
| 2015 | 8,97% | 9,11% | 10,36% | 9,48% | 9,33% | 9,38% | 9,25% | 9,32% |
| 2016 | 9,08% | 9,41% | 9,44% | 9,31% | 9,51% | 9,60% | 9,18% | 9,43% |
| 2017 | 9,61% | 9,98% | 9,94% | 9,84% | 10,15% | 10,63% | 10,71% | 10,50% |
| 2018 | 10,60% | 11,21% | 10,98% | 10,93% | 11,56% | 11,55% | 11,78% | 11,63% |

| Tahun | Tabel 5. NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (%) | | | | | | | |
|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | Bulanan & Triwulan | | | | | | | |
| | Jul | Agt | Sep | TW3 | Okt | Nov | Des | TW4 |
| 2008 | | | | 6,92% | 8,22% | 8,54% | 8,38% | 8,38% |
| 2009 | 7,72% | 7,80% | 8,12% | 7,88% | 7,74% | 8,36% | 7,03% | 7,71% |
| 2010 | 7,16% | 7,18% | 7,43% | 7,26% | 7,48% | 7,53% | 6,50% | 7,17% |
| 2011 | 7,00% | 7,05% | 6,94% | 7,00% | 7,10% | 7,30% | 6,11% | 6,84% |
| 2012 | 6,68% | 6,91% | 6,87% | 6,82% | 6,83% | 6,80% | 6,15% | 6,59% |
| 2013 | 7,35% | 7,89% | 7,58% | 7,61% | 7,48% | 7,34% | 6,50% | 7,11% |
| 2014 | 8,62% | 8,83% | 8,68% | 8,71% | 8,94% | 8,81% | 7,89% | 8,54% |
| 2015 | 9,80% | 9,74% | 9,87% | 9,80% | 10,01% | 9,69% | 8,20% | 9,30% |
| 2016 | 9,97% | 10,99% | 10,47% | 10,48% | 10,49% | 10,13% | 8,63% | 9,75% |
| 2017 | 10,78% | 10,77% | 10,79% | 10,78% | 10,90% | 10,81% | 9,68% | 10,46% |
| 2018 | 11,80% | 11,75% | 11,60% | 11,72% | 11,35% | 10,94% | 9,30% | 10,53% |

Sumber: "Statistik Perbankan Syariah" (On-line), diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> (Juli 2019)

**LAMPIRAN 6 TEBEL DATA PENELITIAN (PDB, INFLASI, *BI RATE*,
DAN NILAI TUKAR (IDR-USD) PER TRIWULAN
PERIODE 2008-2018**

| | PDB (Miliar Rupiah) | Inflasi (%) | BI Rate (%) | Nilai Tukar (Rp) | NPF (%) | LN PDB | LN Nilai Tukar |
|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 2008 TW1 | 1.110.032,30 | 7,64 | 8,00 | 8.628,3 | 7,86 | 13,92 | 9,06 |
| 2008 TW2 | 1.220.605,90 | 10,12 | 8,25 | 8.788,0 | 7,46 | 14,01 | 9,08 |
| 2008 TW3 | 1.327.509,60 | 11,96 | 9,00 | 8.562,7 | 6,92 | 14,10 | 9,06 |
| 2008 TW4 | 1.290.540,60 | 11,50 | 9,42 | 12.020,0 | 8,38 | 14,07 | 9,39 |
| 2009 TW1 | 1.317.409,40 | 8,56 | 8,58 | 11.636,7 | 8,41 | 14,09 | 9,36 |
| 2009 TW2 | 1.383.350,60 | 5,67 | 7,25 | 10.426,0 | 7,91 | 14,14 | 9,25 |
| 2009 TW3 | 1.456.421,80 | 2,76 | 6,58 | 9.887,0 | 8,12 | 14,19 | 9,20 |
| 2009 TW4 | 1.446.689,40 | 2,59 | 6,50 | 9.475,0 | 7,03 | 14,18 | 9,16 |
| 2010 TW1 | 1.603.771,90 | 3,65 | 6,50 | 9.271,67 | 7,40 | 14,29 | 9,13 |
| 2010 TW2 | 1.704.509,90 | 4,37 | 6,50 | 9.091,67 | 7,08 | 14,35 | 9,12 |
| 2010 TW3 | 1.786.196,60 | 6,15 | 6,50 | 8.972,33 | 7,26 | 14,40 | 9,10 |
| 2010 TW4 | 1.769.654,70 | 6,32 | 6,50 | 8.977,33 | 7,17 | 14,39 | 9,10 |
| 2011 TW1 | 1.834.355,10 | 6,84 | 6,67 | 8.863,00 | 6,99 | 14,42 | 9,09 |
| 2011 TW2 | 1.928.233,00 | 5,89 | 6,75 | 8.569,33 | 6,98 | 14,47 | 9,06 |
| 2011 TW3 | 2.053.745,40 | 4,67 | 6,75 | 8.636,33 | 7,00 | 14,54 | 9,06 |
| 2011 TW4 | 2.015.392,50 | 4,12 | 6,17 | 9.024,33 | 6,84 | 14,52 | 9,11 |
| 2012 TW1 | 2.061.338,30 | 3,73 | 5,83 | 9.088,33 | 6,57 | 14,54 | 9,11 |
| 2012 TW2 | 2.162.036,90 | 4,49 | 5,75 | 9.411,67 | 6,45 | 14,59 | 9,15 |
| 2012 TW3 | 2.223.641,60 | 4,48 | 5,75 | 9.544,33 | 6,82 | 14,61 | 9,16 |
| 2012 TW4 | 2.168.687,70 | 4,41 | 5,75 | 9.630,00 | 6,59 | 14,59 | 9,17 |
| 2013 TW1 | 2.235.288,50 | 5,26 | 5,75 | 9.694,67 | 7,15 | 14,62 | 9,18 |
| 2013 TW2 | 2.342.589,50 | 5,65 | 5,83 | 9.817,67 | 7,42 | 14,67 | 9,19 |
| 2013 TW3 | 2.491.158,50 | 8,60 | 6,92 | 10.938,33 | 7,61 | 14,73 | 9,30 |
| 2013 TW4 | 2.477.097,50 | 8,36 | 7,42 | 11.800,00 | 7,11 | 14,72 | 9,38 |
| 2014 TW1 | 2.506.300,20 | 7,76 | 7,50 | 11.754,67 | 7,74 | 14,73 | 9,37 |
| 2014 TW2 | 2.618.947,30 | 7,09 | 7,50 | 11.704,00 | 8,14 | 14,78 | 9,37 |
| 2014 TW3 | 2.746.762,40 | 4,35 | 7,50 | 11.840,00 | 8,71 | 14,83 | 9,38 |
| 2014 TW4 | 2.697.695,40 | 6,47 | 7,67 | 12.239,33 | 8,54 | 14,81 | 9,41 |
| 2015 TW1 | 2.728.180,70 | 6,54 | 7,58 | 12.857,33 | 9,48 | 14,82 | 9,46 |
| 2015 TW2 | 2.867.948,40 | 7,07 | 7,50 | 13.160,00 | 9,32 | 14,87 | 9,48 |
| 2015 TW3 | 2.990.645,00 | 7,09 | 7,50 | 14.055,00 | 9,80 | 14,91 | 9,55 |
| 2015 TW4 | 2.939.558,70 | 4,83 | 7,50 | 13.758,00 | 9,30 | 14,89 | 9,53 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|------|------|-----------|-------|-------|------|
| 2016 TW1 | 2.929.269,00 | 4,34 | 7,00 | 13.505,67 | 9,31 | 14,89 | 9,51 |
| 2016 TW2 | 3.073.536,70 | 3,46 | 6,67 | 13.333,00 | 9,43 | 14,94 | 9,50 |
| 2016 TW3 | 3.205.019,00 | 3,02 | 5,58 | 13.130,67 | 10,48 | 14,98 | 9,48 |
| 2016 TW4 | 3.193.903,80 | 3,30 | 4,75 | 13.350,00 | 9,75 | 14,98 | 9,50 |
| 2017 TW1 | 3.227.762,10 | 3,64 | 4,75 | 13.337,00 | 9,84 | 14,99 | 9,50 |
| 2017 TW2 | 3.366.096,20 | 4,29 | 4,75 | 13.322,33 | 10,50 | 15,03 | 9,50 |
| 2017 TW3 | 3.503.438,90 | 3,81 | 4,50 | 13.388,67 | 10,78 | 15,07 | 9,50 |
| 2017 TW4 | 3.489.915,40 | 3,50 | 4,25 | 13.544,67 | 10,46 | 15,07 | 9,51 |
| 2018 TW1 | 3.511.653,70 | 3,28 | 4,25 | 13.625,33 | 10,93 | 15,07 | 9,52 |
| 2018 TW2 | 3.685.273,40 | 3,25 | 4,75 | 14.077,33 | 11,63 | 15,12 | 9,55 |
| 2018 TW3 | 3.841.755,20 | 3,09 | 5,50 | 14.684,33 | 11,72 | 15,16 | 9,59 |
| 2018 TW4 | 3.798.675,20 | 3,17 | 5,92 | 14.682,33 | 10,53 | 15,15 | 9,59 |

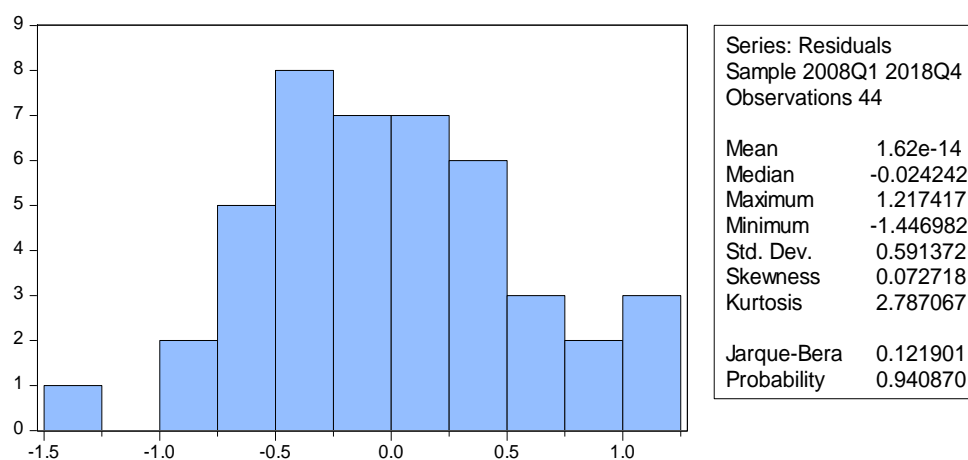
**LAMPIRAN 7 HASIL OUTPUT EVIEWS 9 (UJI STATISTIK
DESKRIPTIF, UJI ASUMSI KLASIK DAN UJI REGRESI
LINEAR BERGANDA)**

a. Statistik Deskriptif

| | PDB | INFLASI | BI_ RATE | NILAI_ TUKAR | NPF |
|--------------|----------|----------|-------------|-----------------|----------|
| Mean | 2416650 | 5.481061 | 6.535909 | 11275.10 | 8.430000 |
| Median | 2409844 | 4.581667 | 6.540000 | 11670.33 | 8.015000 |
| Maximum | 3841755 | 11.96333 | 9.420000 | 14684.33 | 11.72000 |
| Minimum | 1110032 | 2.586667 | 4.250000 | 8562.667 | 6.450000 |
| Std. Dev. | 786882.6 | 2.310918 | 1.242650 | 2067.807 | 1.520665 |
| Skewness | 0.090310 | 1.040643 | 0.054808 | 0.090566 | 0.571811 |
| Kurtosis | 1.899867 | 3.548927 | 2.612735 | 1.444681 | 2.090615 |
| | | | | | |
| Jarque-Bera | 2.278678 | 8.493965 | 0.296981 | 4.495015 | 3.913897 |
| Probability | 0.320030 | 0.014307 | 0.862008 | 0.105662 | 0.141289 |
| | | | | | |
| Sum | 1.06E+08 | 241.1667 | 287.5800 | 496104.3 | 370.9200 |
| Sum Sq. Dev. | 2.66E+13 | 229.6347 | 66.39969 | 1.84E+08 | 99.43420 |
| | | | | | |
| Observations | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

b. Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas



2) Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 7.867787 | Prob. F(2,37) | 0.0014 |
| Obs*R-squared | 13.12900 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0014 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/08/19 Time: 08:15

Sample: 2008Q1 2018Q4

Included observations: 44

Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 1.546469 | 4.775698 | 0.323821 | 0.7479 |
| LN_PDB | 0.118157 | 0.540594 | 0.218569 | 0.8282 |
| INFLASI | -0.019361 | 0.058427 | -0.331367 | 0.7422 |
| BI_RATE | 0.014749 | 0.127012 | 0.116124 | 0.9082 |
| LN_NILAI_TUKAR | -0.350712 | 0.843704 | -0.415682 | 0.6800 |
| RESID(-1) | 0.574164 | 0.165884 | 3.461248 | 0.0014 |
| RESID(-2) | -0.040407 | 0.179507 | -0.225102 | 0.8231 |
| R-squared | 0.298386 | Mean dependent var | 1.62E-14 | |
| Adjusted R-squared | 0.184611 | S.D. dependent var | 0.591372 | |
| S.E. of regression | 0.534003 | Akaike info criterion | 1.728078 | |
| Sum squared resid | 10.55088 | Schwarz criterion | 2.011927 | |
| Log likelihood | -31.01773 | Hannan-Quinn criter. | 1.833343 | |
| F-statistic | 2.622596 | Durbin-Watson stat | 1.803671 | |
| Prob(F-statistic) | 0.032102 | | | |

3) Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Diferensiasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.013404 | Prob. F(2,36) | 0.9867 |
| Obs*R-squared | 0.031996 | Prob. Chi-Square(2) | 0.9841 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/08/19 Time: 08:18

Sample: 2008Q2 2018Q4

Included observations: 43

Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 0.000211 | 0.106800 | 0.001977 | 0.9984 |
| D(LN_PDB) | -0.018407 | 2.403464 | -0.007658 | 0.9939 |
| D(INFLASI) | -0.000381 | 0.065615 | -0.005805 | 0.9954 |
| D(BI_RATE) | -0.002507 | 0.205173 | -0.012221 | 0.9903 |
| D(LN_NILAI_TUKAR) | 0.007013 | 1.370783 | 0.005116 | 0.9959 |
| RESID(-1) | -0.018548 | 0.174347 | -0.106388 | 0.9159 |
| RESID(-2) | 0.021508 | 0.178355 | 0.120589 | 0.9047 |
| R-squared | 0.000744 | Mean dependent var | 6.97E-17 | |
| Adjusted R-squared | -0.165799 | S.D. dependent var | 0.420798 | |
| S.E. of regression | 0.454345 | Akaike info criterion | 1.407980 | |
| Sum squared resid | 7.431453 | Schwarz criterion | 1.694687 | |
| Log likelihood | -23.27156 | Hannan-Quinn criter. | 1.513708 | |
| F-statistic | 0.004468 | Durbin-Watson stat | 1.857107 | |
| Prob(F-statistic) | 1.000000 | | | |

4) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 0.895276 | Prob. F(4,39) | 0.4760 |
| Obs*R-squared | 3.700435 | Prob. Chi-Square(4) | 0.4481 |
| Scaled explained SS | 3.221472 | Prob. Chi-Square(4) | 0.5215 |

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 08/08/19 Time: 08:16

Sample: 2008Q1 2018Q4

Included observations: 44

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 3.008580 | 3.163765 | 0.950949 | 0.3475 |
| LN_PDB | -0.014877 | 0.352169 | -0.042245 | 0.9665 |
| INFLASI | 0.063165 | 0.038525 | 1.639589 | 0.1091 |
| BI_RATE | -0.095296 | 0.084153 | -1.132412 | 0.2644 |
| LN_NILAI_TUKAR | -0.219540 | 0.545273 | -0.402625 | 0.6894 |
| R-squared | 0.084101 | Mean dependent var | 0.468821 | |
| Adjusted R-squared | -0.009838 | S.D. dependent var | 0.353294 | |
| S.E. of regression | 0.355028 | Akaike info criterion | 0.873403 | |
| Sum squared resid | 4.915744 | Schwarz criterion | 1.076152 | |
| Log likelihood | -14.21487 | Hannan-Quinn criter. | 0.948592 | |
| F-statistic | 0.895276 | Durbin-Watson stat | 1.462447 | |
| Prob(F-statistic) | 0.476023 | | | |

5) Uji Multikolinearitas

| | LN_PDB | INFLASI | BI_RATE | LN_NILAI_TUKAR |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| LN_PDB | 1.000000 | -0.510228 | -0.611846 | 0.794512 |
| INFLASI | -0.510228 | 1.000000 | 0.792021 | -0.257200 |
| BI_RATE | -0.611846 | 0.792021 | 1.000000 | -0.263010 |
| LN_NILAI_TUKAR | 0.794512 | -0.257200 | -0.263010 | 1.000000 |

c. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: NPF

Method: Least Squares

Date: 08/08/19 Time: 08:13

Sample: 2008Q1 2018Q4

Included observations: 44

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | -50.53509 | 5.533564 | -9.132467 | 0.0000 |
| LN_PDB | -1.276730 | 0.615959 | -2.072752 | 0.0449 |
| INFLASI | 0.016430 | 0.067381 | 0.243833 | 0.8086 |
| BI_RATE | -0.400462 | 0.147188 | -2.720753 | 0.0097 |
| LN_NILAI_TUKAR | 8.609667 | 0.953706 | 9.027593 | 0.0000 |
| R-squared | 0.848764 | Mean dependent var | 8.430000 | |
| Adjusted R-squared | 0.833253 | S.D. dependent var | 1.520665 | |
| S.E. of regression | 0.620959 | Akaike info criterion | 1.991542 | |
| Sum squared resid | 15.03802 | Schwarz criterion | 2.194291 | |
| Log likelihood | -38.81392 | Hannan-Quinn criter. | 2.066731 | |
| F-statistic | 54.71883 | Durbin-Watson stat | 0.826940 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |